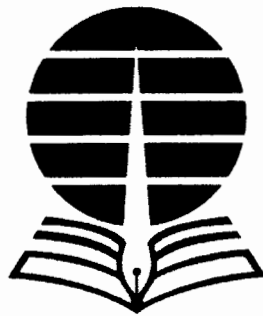


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
SAMPAH KOTA DI KABUPATEN MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ANAS

NIM. 500654765

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2017

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah kota Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat “
adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Majene , 27 Juli 2017
Yang Menyatakan



(Aras)

NIM 500654765

ABSTRACT
WASTE MANAGEMENT ACCOUNTABILITY IN URBAN SETUP
MAMUJU IN WEST SULAWESI PROVINCE

Anas

(ibnoahannas@gmail.com)

Graduate Studies Program

Indonesia Open University

This study was conducted to determine the accountability of the arrangement litter organization and management urban in Mamuju, West Sulawesi province.

This study is a qualitative research, therefore, is becoming an instrument of research is the interview guide which is expected to complete the data needed to determine the shape and form of the arrangement litter control urban

Subjects were employees of the Department of Environment and Hygiene Mamuju in West Sulawesi province and people. The data source consists of primary data and secondary data. Primary data were obtained by interview to the informant by using an interview guide, while secondary data obtained from the literature and documents relating to accountability of organization and management litter urban arrangement of Mamuju in West Sulawesi province. Data were analyzed using qualitative data analysis.

Data analysis result show the accountability of trash management in Kabupaten Mamuju Province of West Sulawesi has already conducted in a good practice, but not optimal yet, which there are still indicators that not in maximum..., especially enhancement of rule and coordination with stakeholder / society (low accountability and process accountability).

The result showed that accountability of litter organization and management urban arrangement of Mamuju in West Sulawesi province is good, but not optimal yet still no indicators that have a negative value / low, in terms of

maximizing a accountability of control garbage especially strengthen the rules and the involvement of the public role.

Keywords: Accountability, organization and mangement, urban garbage

ABSTRAK

AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

Anas

(ibnoahannas@gmail.com)

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan sampah kota di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, oleh karena itu yang menjadi instrument penelitian adalah panduan wawancara yang diharapkan dapat melengkapi data yang dibutuhkan untuk mengetahui bentuk Penyelenggaraan Pengelolaan sampah kota.

Subyek penelitian adalah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan masyarakat . Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada nara sumber dengan menggunakan panduan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari literature dan dokumen yang berhubungan dengan akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Data dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan sampah Kota Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan cukup baik, tetapi belum optimal, dimana masih ada indikator yang belum maksimal pelaksanaannya terutama memperkuat aturan dan pelibatan peran masyarakat (akuntabilitas hukum dan akuntabilitas proses).

Kata Kunci : Akuntabilitas, Penyelenggaraan dan pengelolaan, sampah kota,

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

Judul TAPM : AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN SAMPAH KOTA
KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI
BARAT

Penyusun TAPM A N A S

NIM 500654765

Program Studi MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Hari Tanggal Sabtu, 19 Agustus 2017

Menyetujui :

Pembimbing II,



Dr. Agus Santosa, MM
NIP.19580818 198603 1 005

Pembimbing I,



Dr. Asdar Djamereng, SE, MM
NIDN. 0913026101

Penguji Ahli



Dr. Agus Maulana, M.S.M
NIDN. 0005085202

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Administrasi
Program Magister Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027' 198603 1 003

Direktur
Program Pascasarjana



Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : ANAS
NIM : 500654765
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN SAMPAH KOTA DI
KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI
BARAT

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program
Magister (TAPM) Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas
Terbuka

Pada :
Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Agustus 2017
W a k t u : 9.30 s/d 11.00 WITA
dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

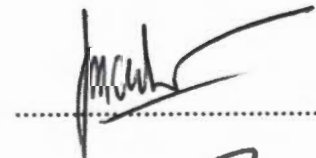
Ketua Komisi Penguji
Drs. Arifin T, S.Pd., M.Pd

:


.....

Penguji Ahli
Dr. Agus Maulana, M.S.M

:


.....


Pembimbing I
Dr. Asdar Djamereng, SE, MM

:


.....

Pembimbing II
Dr. Agus Santosa, MM
Nama: DR. Agus Santosa, MM

:


.....

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada saya sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tesis ini penulis susun dengan maksud untuk mengetahui bagaimana bentuk Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber daya manusia aparatur merupakan faktor penentu berhasil tidaknya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berkualitas, memiliki budi pekerti yang luhur, berdaya guna dan berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belumlah sempurna, tentu di sana-sini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu semua kritikan, saran dan masukan sangat penulis harapkan demi kebaikan bagi penulis, namun demikian penulis tetap berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka pengkajian ilmu administrasi publik khususnya terkait dengan kinerja pegawai kebersihan.

Untuk itu dalam kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyusun tesis ini, yaitu:


1. Bapak Drs. Arifin, S. Pd., M.Pd. Selaku Kepala UPBJJ-Universitas Terbuka, Majene.
2. Bapak DR. Asdar Djamereng, SE, MM. Selaku Dosen Pembimbing I

3. Bapak DR. Agus Santosa, MM. Selaku Dosen Pembimbing II
4. Bapak Hamdan Malik, SSTP (kepala dinas DLHK), Bapak Amran, ST (kepala seksi kebersihan DLHK), Bapak Hasan, ST. (kepala Seksi Prasarana dan perlengkapan), selaku responden.
5. Semua Pihak Yang Tidak Bisa Penulis Sebutkan Satu Persatu Yang Telah Membantu Penulis Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Dalam Menyelesaikan Laporan TAPM
6. Seluruh Keluarga, Sahabat Dan Rekan-Rakan Seangkatan Magister Administrasi Publik Yang Tak Henti-Hentinya Memberikan Bantuan Dan Motivasi Kepada Penulis.
7. Istri Dan Anaku Yang Telah Tulus Memberikan Dorongan Dan Perhatian Yang Besar Selama Berlangsungnya Pendidikan.
8. Terkhusus Kepada Kedua Orangtua Alm. H.P. LAUNDU dan Alm.H.P. NORMA, Semua Keberhasilan Ini, Saya Dedikasikan Untuk Beliau.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri bagi daran kritik demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang berkepenting.

Mamuju, 26 Juli 2017

Penulis



Anas, ST
NIM. 500654765

RIWAYAT HIDUP

Nama : ANAS
NIM : 500654765
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat / Tanggal Lahir : Pinrang, 26 September 1974

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SDN No 4 Pinrang pada tahun 1987
Lulus SMP di SMP Muhammadiyah Pinrang Pada Tahun 1990
Lulus SMA di SMA 243 Pinrang Pada Tahun 1993
Lulus S1 di Universitas 45 Makassar pada tahun 2002

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2002 s/d 2005 sebagai Site Enggengering di PT PANCAPUTRA
Tahun 2006 s/d 2017 sebagai PNS di SKPD Dinas PU dan Pera Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2006 s/d 2017 sebagai Staf Teknis di Satker (SNVT) Cipta Karya KEMENPU/PERA

Majene, 27 Juli 2017



ANAS

NIM. 500654765

DAFTAR ISI

Abstrak.....	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	vii
Kata Pengantar.....	viii
Riwayat Hidup	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Skema.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

A. Kajian Teori	8
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Berpikir.....	34
D. Operasionalisasi Konsep.....	37

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Desain Penelitian	39
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	40
C. Instrumen Penelitian	41
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	42
E. Metode Analisis Data.....	45
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 48
A. Deskripsi Objek Penelitian	48
B. Hasil	51
C. Pembahasan.....	56
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	69
 DAFTAR PUSTAKA.....	 71
Lampiran Pedoman Wawancara	78
Lampiran peta penempatan kontainer	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Simbol 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle)	21
--	----

DAFTAR SKEMA

Skema 1.1	Skema Pelaksanaan Pengelolaan Sampah DLHK Kabupaten Mamuju(pola ambil, angkut, buang)	5
Skema 2.1	Kerangka Pikir.....	36
Skema 4.1	Skema Standar Penyelenggaraan dan Pengelola Sampah	58
Skema 4.2	Bagan Alir Proses SOPPengelolaan Teknik Persampahan Kabupaten Mamuju	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Unit Rumah Tangga di Kabupaten Mamuju dan Jumlah Wadah Sampah Berdasar Angka Proyeksi.....	2
Tabel 1.2. Dana Alokasi Dan Peningkatan Jumlah Sampah 2014 -2017	4
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4.1. Luas Wilayah, Jumlah Desa, Kelurahan dan UPT pada masing-masing Kecamatan Di Kabupaten Mamuju	49
Tabel 4.2 . Data Penduduk Per Kacamatan	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Pedoman Teknis Wawancara Riset Tesis.....	78
Lampiran II Peta Rekomendasi Penempatan Kontainer	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya provinsi sulawesi barat sebagai provinsi yang ke 32 dengan Kabupaten Mamuju sebagai pusat pemerintahannya, membawa beberapa konsekuensi antara lain ; (1) peningkatan pertumbuhan penduduk kota mamuju secara signifikan baik melalui kelahiran maupun melalui proses urbanisasi, lebih-lebih melalui proses migrasi antar kota, dan (2) Pola aktivitas masyarakat yang semakin padat dan beragam seperti perkantoran, bisnis serta jasa lainnya yang semakin ramai. Akibatnya akan berdampak langsung dan menimbulkan persoalan-persoalan sosial dan lingkungan, salah satu persoalan perkotaan yang cukup krusial adalah masalah sampah, sebagaimana disampaikan oleh Madjid : (2003 : 22). Hal yang sama juga dikatakan oleh Salahuddin (2005:44), berpendapat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya estetika perkotaan adalah kurangnya pengendalian sampah dan rusaknya lingkungan hidup.

Di kabupaten Mamuju khususnya di area publik dan permukiman, Sampah-sampah itu berserakan dibeberapa tempat, dibuang disembarang tempat tanpa ada kekhawatiran sampah tersebut akan mempengaruhi citra penduduk kota secara umum, hal tersebut dapat terlihat pada area- area publik seperti taman-taman kota, anjungan pantai dan ruang terbuka lainnya bahkan di jalan-jalan kota yang padat, pengendara dengan seenaknya membuang sampah.

Berdasarkan pengamatan peneliti sebelum tahun 2017 area publik seperti taman dan anjungan tidak memiliki tempat sampah yang representatif (terdiri dari 3 bin

sampah dalam 1 unit), begitu juga pada mobil-mobil angkutan dan pribadi, rata-rata tidak memiliki kotak sampah.

Belum lagi beberapa orang (rumah tangga) yang berada dikawasan perumahan-perumahan yang memanfaatkan pinggir jalan permukiman dan drainase primer sebagai TPS (tempat pembuangan sementara) sampah, sampah – sampah tersebut disatukan di kantong plastik kemudian ditumpuk dan dibiarkan begitu saja tanpa diawasi sehingga jika terdapat binatang seperti anjing, kambing , ayam dan sapi maka sampah–sampah tersebut akan terhambur.

Dibeberapa tempat permukiman penduduk (rumah tangga) yang memiliki tempat sampah juga tidak kalah kotornya, selain jumlah tempat sampah yang tidak sesuai dengan standar minimal (tabel 1.1) tempat sampah tempat-tempat sampah banyak yang tampak lusuh, kumal, kotor dan tidak tertata rapi serta tanpa penutup, menyebarkan bau yang tidak sedap sehingga lalat mudah hinggap. Nasib serupa terlihat di kontainer-kontainer sampah yang disediakan pemda di pasar-pasar dan lokasi permukiman.

Tabel 1.1
Jumlah Unit Rumah Tangga di Kabupaten Mamuju dan Jumlah Wadah Sampah
Berdasar Angka Proyeksi

No	Kecamatan	Unit Rumah Tangga		Wadah Sampah (2017)	
		2013	2017	Kondisi	Standar
1	Tappalang	3.195	3.470		
2	Tappalang Barat	1.611	1.750		
3	Mamuju	1.082	11.174	9.679	23.914
4	Simboro	4.287	4.659	3.154	9.318
5	Balak-balakang	418	454		
6	Kalukku	8.959	9.735		
7	Papalang	3.800	4.130		
8	Sampaga	2.496	2.712		

9	Tommo	3.555	3.863		
10	Kalumpang	1.905	2.070		
11	Bonehau	1.543	1.676		
	Jumlah	138.698	133.560		

Sumber : Hasil perhitungan Team PTMP 2015

Dari segi koordinasi antar instansi pemerintah juga mengalami permasalahan, adanya peraturan pemerintah yang terbaru mengenai kelembagaan baru dipemerintahan daerah yang semula kegiatan penataan kawasan permukiman dan kebersihan dibawah 1 (satu) naungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas (SKPDD), kini terbagi menjadi 3 (tiga) SKPD yaitu bagian kebersihan dan pengelolaan sampah/lingkungan berada di SKPD DLHK, bagian penataan kawasan permukiman berada di SKPDD permukiman dan perumahan dan bagian penataan fungsi-fungsi kota dan kawasan strategis berada di SKPDD pekerjaan umum dan penataan Ruang.

Tentu hal tersebut menyebabkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan sampah yang bila dikaitkan dengan kebersihan kota akan sedikit tidak terfokus pada satu SKPD seperti semula tetapi harus sejalan dengan kebijakan dimasing-masing SKPDD tersebut. Koordinasi dan sinkronisasi program adalah kunci dalam mewujudkannya.

Wawancara dengan pihak DLHK Kabupaten Mamuju, khususnya dari segi pembiayaan, setiap tahunnya mengalami tren peningkatan, pada tahun 2015 berkisar Rp 4 milyar rupiah, tahun 2016 berkisar Rp 8 milyar rupiah saat masih penggabungan dinas, dan tahun 2017 berkisar Rp 5 milyar rupiah. Trend kinerja pun cukup meningkat, berdasarkan jumlah armada yang dimiliki, perkiraan sampah yang diangkut pada tahun 2014 adalah sebesar 65.520 Ton, tahun 2015 sebesar 66,980 Ton dan tahun 2017 ini diperkirakan berkisar 73,800 Ton. jumlah

Tonase sampah tersebut belum termasuk sampah yang berada dan mengotori saluran drainase primer, sungai dan laut.

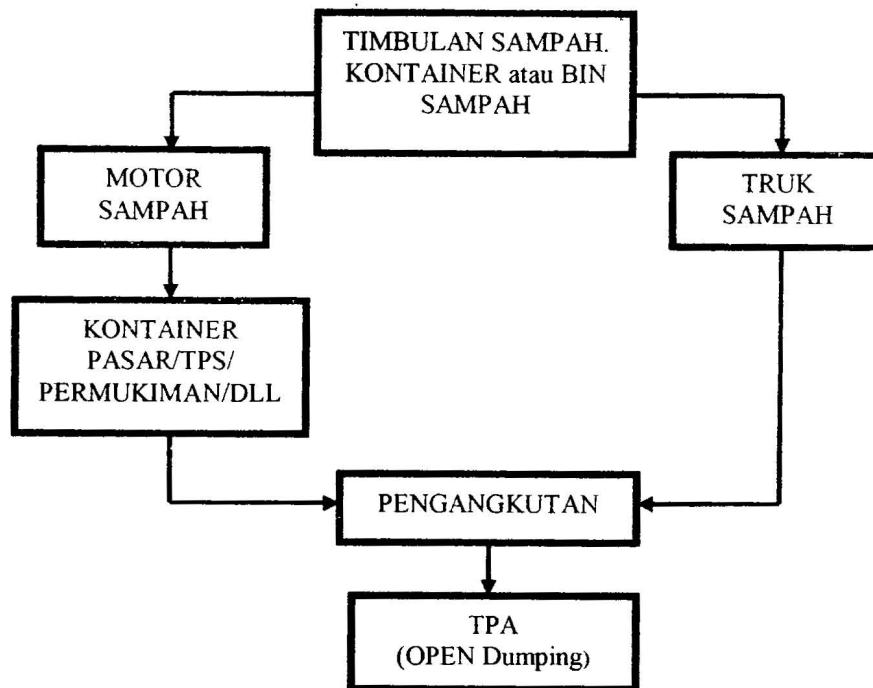
Tabel 1.2.
Dana Alokasi Dan Peningkatan Jumlah Sampah 2014 -2017

Nomor	Tahun	Jumlah Produksi Sampah (ton)	Alokasi Dana (Rp x 1000)	Keterangan
1	2014	65.520	4.000.000	Dinas Tarkimber
2	2015	66.980	4.000.000	Dinas Tarkimber
3	2016	69.100	8.000.000	Dinas Tarkimber
4	2017	73.800	5.000.000	Bidang Kebersihan DLHK

Sumber data : PTMP dan Wawancara DLHK

Dari segi layanan harian yang terlihat dilapangan, pada umumnya Penyelenggaraan Pengelolaan sampah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan (pola ambil, angkut dan buang sudah terealisasi dengan baik) sebagaimana misalnya pada tahun 2015 dibeberapa tempat kontainer-kontainer sampah yang disediakan banyak yang tidak terangkut selama 5-7 hari, pada tahun 2016 - 2017 sampah-sampah kontainer tersebut sudah mulai terangkut penuh dalam 2-3 hari, hanya yang menjadi kekurangan adalah pemilahan dan pengolahan sampah seharusnya dilakukan, baik itu dilakukan oleh DLHK di area TPA ataupun melibatkan masyarakat di TPS3R (UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah / PP 81 tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga).

Skema 1.1
Skema Pelaksanaan Pengelolaan Sampah DLHK Kabupaten Mamuju
(pola ambil, angkut, buang)



Dari segi kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan dan penanganan sampah yang dilakukan oleh pemda dalam beberapa tahun ini juga mengalami peningkatan meskipun belum memenuhi harapan, hal ini dapat dilihat dari protes – protes (biasanya karena bau busuk) masyarakat tentang sampah yang belum terangkut atau penempatan kontainer di area permukiman, via telepon yang biasanya langsung ke lurah, camat dan DLHK atau ke Bupati,

Untuk menilai permasalahan-permasalahan rumit dan dilematis tersebut diatas, maka peneliti akan meninjau peran dan tanggung jawab lembaga (DLHK Kabupaten Mamuju) melalui aspek akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang selama ini telah dilaksanakan, serta peran masyarakat sebagai

penerima layanan, sekaligus sebagai bagian dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan tersebut.

Harus diakui keberadaan akuntabilitas (penyelenggaraan pengelolaan sampah) begitu vital terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah, kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanatkan kepada lembaga tersebut. Selain itu dengan akuntabilitas diartikan bahwa suatu instansi pemerintah telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang, atau yang akan dijalankan. Dengan akuntabilitas juga akan dapat diukur bagaimana mereka menyelenggarakan dan mempertahankan (memegang) tanggungjawab mereka terhadap pencapaian hasil.(sankri, 2004:476). Akuntabilitas dapat diformalkan melalui Undang-Undang, aturan, peraturan, dan pemerintah pengadilan atau didasarkan pada sejumlah pemeriksaan dan keseimbangan informal yang dikembangkan melalui konotasi langsung, rumor dukungan, ancaman oposisi atau tipe rumusan lain yang dipahami namun tak tertulis (Manggaukang, 2006 dalam zulkifli naharuddin 2014 :1).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti menyusun tesis, yang mengambil judul “Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan sampah kota di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan sampah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu administrasi publik berkaitan dengan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dan bahan dalam pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Defenisi Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas menurut salim (1987:16) berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawab.

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syahrudin Rasul, 2002:8).

Akuntabilitas merupakan konsep yang komplek yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). (Turner and Hulme, 1997). Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Menurut Dubnick (2001:22), akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (*answerability*) kepada sejumlah otoritas eksternal. Menurut

Romzek dan Ingraham akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan. Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja.

Selain penjabaran tersebut diatas berikut ini beberapa pengertian dari akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu peningkatan dari rasa tanggung jawab, suatu yang lebih tinggi mutunya dari suatu tanggung jawab sehingga memuaskan atasan. Selain itu akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai orang lain karena kualitas performannya menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawab. Menurut Elliot (2007:13) akuntabilitas adalah cocok atau sesuai dengan yang diharapkan oleh orang lain dan menjelaskan dan mempertimbangkan kepada orang lain tentang keputusan dan tindakan yang diambil. Akuntabilitas menurut Lessinger (2000 : 34), adalah kajian hubungan antara apa yang sudah dilakukan sekolah dengan dana yang digunakan dengan hasil belajar yang diperoleh.

Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.

Pengertian akuntabilitas menurut Lawton dan Rose (2001 : 55) dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka.

2. Tipe-Tipe, Dimensi dan Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya menurut Rosjidi (2001:145) jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe yaitu :

a. Akuntabilitas Internal.

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

b. Akuntabilitas Eksternal.

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

Mardiasmo (2010 :23) menyebutkan akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya, Mardiasmo (2006 :5) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu :

- a. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*). Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
- b. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*). Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Ellwood (1993) dalam Garini (2011:22) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum), yaitu :

- a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- b. Akuntabilitas Proses.
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal

kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

c. Akuntabilitas Program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dengan kata lain bahwa akuntabilitas program menunjukkan agar program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi

d. Akuntabilitas Kebijakan.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan petanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Dari dimensi Akuntabilitas, maka dapat diturunkan indikator sebagai berikut :

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

- 1) Kepatuhan terhadap hukum
- 2) Penghindaran korupsi dan kolusi

b. Akuntabilitas proses

- 1) Adanya kepatuhan terhadap prosedur
- 2) Adanya pelayanan publik yang responsif
- 3) Adanya pelayanan publik yang cermat

4) Adanya pelayanan publik yang biaya murah

c. Akuntabilitas program

1) Alternatif program yang memberrikan hasil yang optimal

2) Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat

d. Akuntabilitas kebijakan

1) Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil

3. Sifat Akuntabilitas dan ciri Akuntabilitas Pemerintahan

Akuntabilitas dapat dipandang dari beberapa prespektif, salah satunya dari prespektif fungsional yaitu akuntabilitas yang dilihat dari lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*legal compliance*) ketahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran subjektif, Yaitu :

- a. *Probility and legality accountability* Hal ini menyangkut pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah distujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*compliance*)
- b. *Process accountability* dalam hal ini digunakan prosedur, proses, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan (*planning, allocation, and managing*)
- c. *Performance accountability* pada level ini apakah kegiatan telah dilakukan sudah efisien (*efficient and economy*)
- d. *Program accontability* disini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*)
- e. *Policy accountability* dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*)

Herman Finner (1941) dalam joko widodo (2011 : 67) menjelaskan akuntabilitas sebagai suatu konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi dan masyarakat luaslah yang menentukan dan menilai *accountable* atau tidaknya sebuah birokrasi pemerintahan. Terdapat ciri pemerintahan yang akuntabel antara lain :

- a. Mampu menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada publik
- c. Mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional
- d. Mampu memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan dan pembangunan
- e. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja (performance) pemerintah dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program /kegiatan pemerintahan

4. Pengertian Sampah dan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Pengertian Penyelenggaraan Pengelolaan sampah jika di tinjau dari aspek pengelolaan sampah menurut Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi :

- a. penanganan meliputi :
 - 1) Pembatasan timbulan sampah
 - 2) Pendaaur ulang sampah

3) Pemanfaatan kembali sampah

b. pengurangan sampah meliputi :

- 1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- 2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- 3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- 4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- 5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Didalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Sampah adalah bahan sisa baik bahan-bahan yang tidak berguna lagi (barang bekas) maupun barang yang sudah tidak diambil bagian utamanya lagi. Dari segi lingkungan, sampah adalah bahan buangan yang tidak berguna dan

banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan pada kelestarian lingkungan (Nur Aini Ulin Hikmah, 1999).

Menurut Kamus Istilah Lingkungan, 1994; sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan.

Sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat diurai oleh mikroorganisme pengurai sehingga dalam waktu lama akan mencemari tanah. Sampah ialah bahan yang tidak dipakai lagi (*refuse*) karena telah diambil bagian utamanya dengan pengolahan (A. Tresna Sastrawijaya, 1991).

Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah (*waste*) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya. Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Dengan demikian sampah mengandung prinsip sebagai berikut :

- Adanya sesuatu benda atau bahan padat
- Adanya hubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan manusia
- Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi (Notoatmojo, 2003)

Pengertian sampah menurut SNI 13-1990-F tentang Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan didefinisikan sebagai limbah yang bersifat padat, terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sampah yang merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia

telah menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks, antara lain (Tchobagnolous, 1993) :

- a. Masalah estetika dan kenyamanan.
- b. Merupakan sarang atau tempat berkumpulnya berbagai binatang yang dapat menjadi vektor penyakit.
- c. Menyebabkan terjadinya polusi udara, air dan tanah.
- d. Menyebabkan terjadinya penyumbatan saluran-saluran air buangan dan drainase.

Meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan munculnya permasalahan sampah di perkotaan. Permasalahan sampah umumnya terjadi pada setiap kota di Indonesia, diantaranya adalah (Tchobanoglous, 1993) :

- a. Bertambah kompleksnya masalah persampahan sebagai konsekuensi logis dari pertambahan penduduk kota.
- b. Peningkatan kepadatan penduduk memerlukan peningkatan metode/pola pengelolaan sampah yang lebih baik.
- c. Keheterogenan tingkat sosial budaya penduduk kota.
- d. Situasi dana serta prioritas penanganan relatif rendah dari pemerintah daerah.
- e. Pergeseran teknik penanganan makanan.
- f. Keterbatasan sumber daya manusia untuk menangani masalah sampah.
- g. Pengembangan perancangan peralatan persampahan yang sangat lambat.
- h. Partisipasi masyarakat umumnya masih kurang terarah dan terorganisasi secara baik.

- i. Konsep pengelolaan persampahan yang kadangkala tidak cocok untuk diterapkan, serta kurang terbukanya kemungkinan modifikasi konsep tersebut di lapangan.

Sampah menurut sumbernya berasal dari beberapa tempat, yakni :

- a. Pemukiman penduduk

Sampah yang dihasilkan dari kegiatan atau lingkungan rumah tangga atau sering disebut dengan istilah sampah domestik. Dari kelompok sumber ini umumnya dihasilkan sampah berupa sisa makanan, plastik, kertas, karton / dos, kain, kayu, kaca, daun, logam, dan kadang-kadang sampah berukuran besar seperti dahan pohon. Praktis tidak terdapat sampah yang biasa dijumpai di negara industri, seperti mebel, TV bekas, kasur dll. Kelompok ini dapat meliputi rumah tinggal yang ditempati oleh sebuah keluarga, atau sekelompok rumah yang berada dalam suatu kawasan permukiman, maupun unit rumah tinggal yang berupa rumah susun. Dari rumah tinggal juga dapat dihasilkan sampah golongan B3 (bahan berbahaya dan beracun), seperti misalnya baterai, lampu TL (*tubular lamp*), sisa obat-obatan, oli bekas, dll.

- b. Sampah dari daerah komersial

Sumber sampah dari kelompok ini berasal dari pertokoan, pusat perdagangan, pasar, hotel, perkantoran, dll. Dari sumber ini umumnya dihasilkan sampah berupa kertas, plastik, kayu, kaca, logam, dan juga sisa makanan. Khusus dari pasar tradisional, banyak dihasilkan sisa sayur, buah, makanan yang mudah membusuk. Secara umum sampah

dari sumber ini adalah mirip dengan sampah domestik tetapi dengan komposisi yang berbeda.

c. Sampah dari perkantoran / institusi

Sumber sampah dari kelompok ini meliputi perkantoran, sekolah, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, dll. Dari sumber ini potensial dihasilkan sampah seperti halnya dari daerah komersial non pasar.

d. Sampah dari jalan / taman dan tempat umum

Sumber sampah dari kelompok ini dapat berupa jalan kota, taman, tempat parkir, tempat rekreasi, saluran drainase kota, dll. Dari daerah ini umumnya dihasilkan sampah berupa daun / dahan pohon, pasir / lumpur, sampah umum seperti plastik, kertas, dll.

e. Sampah dari industri dan rumah sakit yang sejenis sampah kota

Kegiatan umum dalam lingkungan industri dan rumah sakit tetap menghasilkan sampah sejenis sampah domestik, seperti sisa makanan, kertas, plastik, dll. Yang perlu mendapat perhatian adalah, bagaimana agar sampah yang tidak sejenis sampah kota tersebut tidak masuk dalam sistem pengelolaan sampah kota.

f. Pertanian

Sampah dihasilkan dari tanaman dan binatang. Dari daerah pertanian ini misalkan sampah dari kebun, kandang, ladang, dan sawah. Sampah yang dihasilkan dapat berupa bahan-bahan makanan yang membusuk, sampah pertanian, pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

Berdasarkan informasi tersebut diatas maka jenisnya, sampah dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut :

- a. Sampah organik, adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Selain itu, pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, buah-buahan dan lain-lain.
- b. Sampah Anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/ mikroorganisme secara keseluruhan (unbiodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng, (Gelbert dkk, 1996).
- c. Sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun) sampah jenis ini memerlukan penanganan tersendiri dan khusus dikarenakan kandungan kimia dan material pembuatannya, sampah jenis ini biasanya dihasilkan dari rumah sakit-rumah sakit seperti perban luka, jarum suntik bekas, botol serum obat, obat-obat kadaluwarsa dan lain-lain.

Salah satu cara pengurangan sampah dari sumbernya adalah dengan metode pengelolaan 3R, 4-R atau 5-R. Pengurangan sampah metode 3-R adalah konsep pengurangan sampah dengan cara *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), *Recycle* (mendaur ulang sampah), sedangkan 4-R ditambah *Replace* (mengganti) mulai dari sumbernya. Prinsip 5-R selain 4 prinsip tersebut di atas ditambah lagi dengan *Replant* (menanam kembali).



Gambar 2.1.

Simbol 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*)

a. *Reduce* (mengurangi penggunaan)

Prinsip *Reduce* dilakukan dengan cara sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang digunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan.

Menurut Suyoto (2008) tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan program *reduce*:

- Hindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar
- Gunakan kembali wadah/kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lain
- Gunakan baterai yang dapat di *charge* kembali

- Jual atau berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan
- Ubah pola makan (pola makan sehat : mengkonsumsi makanan segar, kurangi makanan kaleng/instan)
- Membeli barang dalam kemasan besar (*versus* kemasan *sachet*)
- Membeli barang dengan kemasan yang dapat di daur ulang (kertas, daun dan lain-lain)
- Bawa kantong/tas belanja sendiri ketika berbelanja
- Tolak penggunaan kantong plastik
- Gunakan rantang untuk tempat membeli makanan
- Pakai serbet/saputangan kain pengganti tisu
- Kembali ke pemakaian popok kain bagi para ibu

b. Reuse (menggunakan ulang)

Prinsip *reuse* dilakukan dengan cara sebisa mungkin memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Dan juga menghindari pemakaian barang-barang yang hanya sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah.

Menurut Suyoto (2008) tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan program *reuse*:

- Pilih produk dengan pengemas yang dapat didaur ulang
- Gunakan produk yang dapat diisi ulang (*refill*)
- Kurangi penggunaan bahan sekali pakai
- Plastik kresek digunakan untuk tempat sampah

- Kaleng/baskom besar digunakan untuk pot bunga atau tempat sampah
- Gelas atau botol plastik untuk pot bibit, dan macam-macam kerajinan
- Bekas kemasan plastik tebal isi ulang digunakan sebagai tas
- *Styrofoam* digunakan untuk alas pot atau lem
- Potongan kain/baju bekas untuk lap, keset, dan lain-lain
- Majalah atau buku untuk perpustakaan
- Kertas koran digunakan untuk pembungkus

c. Reycle (daur ulang)

Prinsip *recycle* dilakukan dengan cara sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.

Menurut Suyoto (2008) tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan program *recycle*:

- Mengubah sampah plastik menjadi souvenir
- Lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos
- Mengubah sampah kertas menjadi lukisan atau mainan miniatur

Mengurangi sampah dari sumber timbulan, di perlukan upaya untuk mengurangi sampah mulai dari hulu sampai hilir, upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi sampah dari sumber sampah (darihulu) adalah menerapkan prinsip

3R. Dan tanggung jawab pelaksanaan 3R saat ini lebih di bebaskan kepada peran serta masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat TPS 3R.

Selain upaya pengurangan sampah sebagaimana tersebut diatas maka dalam PP Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga juga diatur mengenai penanganan sampah yaitu sebagai berikut

a. Pemilahan

Tindakan pemilahan sampah adalah tindakan pemisahan sampah yang dilakukan di sumbernya berdasarkan jenis sampah yaitu organik, anorganik dan B3 dalam masing-masing wadah

b. Pengumpulan

Pengumpulan sampah adalah pengumpulan yang dilakukan oleh petugas kebersihan dari wadah-wadah sampah dimasing-masing rumah tangga

c. Pengangkutan

Sampah-sampah yang diambil dari wadah sampah kemudian diangkut menggunakan truk sampah, motor sampah, atau kendaraan jenis lainnya

d. Pengolahan

Sebelum sampah tersebut dibuang TPA sampah maka dilakukan pengolahan terlebih dahulu seperti pengomposan, pemadatan, atau pendauran ulang.

e. Pemrosesan akhir sampah

TPA adalah tempat pemrosesan akhir sampah yang merupakan tempat bermuaranya seluruh sampah kota untuk kemudian diurug.

Tugas dan fungsi pelaksana kegiatan tersebut sebagian besar menjadi kewenangan dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten.

5. Perencanaan Teknis Dan Manajemen Persampahan (PTMP)

Pengelolaan sampah dalam sistem PTMP ini adalah pengaturan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pengelolaan timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku massa.

Pengelolaan persampahan mempunyai tujuan yang sangat mendasar yang meliputi meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), melindungi fasilitas sosial ekonomi dan menunjang sektor strategis (Rahardyan Dan Widagdo 2005).

Sistem pengelolaan sampah perkotaan (menjadi dasar akuntabilitas pengendalian sampah pemerintah daerah) pada dasarnya dilihat sebagai komponen-komponen sub sistem yang saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yaitu kota yang bersih, sehat dan teratur (Syafudin dan Priyambada 2001).

Di dalam dokumen PTMP Kabupaten Mamuju (2015) disebutkan bahwa komponen-komponen Penyelenggaraan Pengelolaan sampah akan terwujud dan berhasil jika kelima sistem ini dapat berjalan sebagai berikut (Kodoatie, 2003:217)

- a. Sub sistem teknis Operasional (sub sistem teknik),

Aspek Teknis Operasional merupakan komponen yang paling dekat dengan obyek persampahan. Menurut Hartoyo (1998:6), perencanaan sistem persampahan memerlukan suatu pola standar spesifikasi sebagai landasan yang jelas. Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman.

Aspek Teknik Operasional merupakan salah satu upaya dalam mengontrol pertumbuhan sampah, namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan pertimbangan kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan (Tchobanoglous, 1997:363).

Faktor yang paling mempengaruhi efektifitas tingkat pelayanan adalah kapasitas peralatan, pola penampungan, jenis dan sifat bahan dan lokasi penempatan (SNI 19-2454-2002).

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 (dua) yaitu pola individual dan pola komunal (SNI 19-2454-2002).

Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut dan atau ram dan atau kantor, bengkel (SNI 19-2454-2002). Pemindahan sampah yang telah terpilah dari sumbernya diusahakan jangan sampai sampah tersebut bercampur kembali (Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko, 2002:29).

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan *truck container* tertentu yang dilengkapi alat pengepres, sehingga sampah dapat dipadatkan 2-4 kali lipat (Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko, 2002:29). Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah di TPA dibedakan menjadi 3 metode yaitu :

1) Metode ***Open Dumping***

Merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang/ menimbun sampah disuatu tempat tanpa ada perlakuan khusus/pengolahan sehingga sistem ini sering menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

Dan sejak tahun 2013 sistem ini sudah tidak dipergunakan lagi, karena mencemari lingkungan dan air tanah permukiman

2) Metode ***Controlled Landfill*** (Penimbunan terkendali)

Controlled Landfill adalah sistem open dumping yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan open dumping dan sanitary landfill yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu.

3) Metode ***Sanitary landfill*** (Lahan Urug Saniter)

Sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup.

b. Sub sistem organisasi dan manajemen (Kelembagaan),

Untuk operasionalisasi kebijakan maka dari aspek kelembagaan menetapkan beberapa strategi dalam mengatasi masalah persampahan, meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola, meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan, meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain serta meningkatkan kualitas SDM manusia (Anonim, 2006: 18).

Organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial budaya dan kondisi fisik dan estetika wilayah kota dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota. Perancangan dan pemilihan organisasi disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang membinanya. pola sistem operasional yang diterapkan. kapasitas kerja sistem dan lingkup tugas pokok dan fungsi yang harus ditangani (Rahardyan dan Widagdo, 2005).

Menurut Syafrudin dan Priyambada (2001), bentuk kelembagaan pengelola sampah disesuaikan dengan kategori kota. Adapun bentuk kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kota Raya dan kota besar (jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa) bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa perusahaan daerah atau dinas tersendiri.
- 2) Kota sedang 1 dengan jumlah penduduk 250.000 jiwa - 500.000 jiwa atau ibu kota propinsi berupa dinas tersendiri.

- 3) Kota sedang 2 dengan jumlah penduduk 100.000 jiwa - 250.000 jiwa atau kota/kotif berupa dinas/suku dinas atau UPTD dinas pekerjaan umum atau seksi pada dinas pekerjaan umum.
- 4) Kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 jiwa - 100.000 jiwa berupa UPTD dinas pekerjaan umum atau seksi pada dinas pekerjaan umum.

c. Sub sistem hukum dan Peraturan (sub sistem Hukum),

Hukum dan peraturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, ketertiban masyarakat, tanggung jawab masing-masing instansi, individu dan sebagainya.

Menurut Rahardyan dan Widagdo (2005), peraturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah di perkotaan antara lain adalah mengatur tentang :

- 1) Ketertiban umum yang terkait dengan penanganan persampahan
- 2) rencana induk pengelolaan sampah kota
- 3) bentuk lembaga dan organisasi pengelola
- 4) tata cara penyelenggaraan pengelolaan
- 5) tarif jasa pelayanan atau retribusi
- 6) kerjasama dengan berbagai pihak terkait, diantaranya kerjasama antar daerah atau kerjasama dengan pihak swasta

d. Sub sistem Pembiayaan (sub sistem finansial)

Pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar pada roda sistem pengelolaan persampahan di kota tersebut dapat bergerak dengan lancar. Sistem pengelolaan persampahan di Indonesia lebih diarahkan pada pembiayaan sendiri termasuk membentuk perusahaan daerah.

Masalah umum yang sering dijumpai dalam sub sistem pembiayaan adalah retribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya operasional, dana pembangunan di daerah berdasarkan skala prioritas, kewenangan dan struktur organisasi yang ada tidak berhak mengelola dana sendiri dan penyusunan tarif retribusi tidak didasari metode yang benar.

Menurut Syafaruddin dan Priyambada (2001), besaran retribusi sampah adalah 1 % dari penghasilan per rumah tangga. Dengan demikian besaran retribusi sampah bervariasi sesuai tingkat pendapatan, makin tinggi pendapatan suatu rumah tangga maka makin besar retribusi yang harus mereka bayarkan karena makin tinggi tingkat ekonomi seseorang makin besar sampah yang mereka hasilkan.

Pada dasarnya pemerintah perlu melakukan terobosan kebijakan khususnya dalam pembiayaan ini, seperti membuat regulasi ditingkat daerah dimana pemerintah daerah dapat mendapatkan porsi pembiayaan khusus atau melalui bantuan swasta dan lainnya, dengan melakukan pemberdayaan dan pembinaan sekaligus pemberian bantuan dana pengoperasian kepada, TPS 3R dan Bank Sampah

e. Subsistem Peran serta Masyarakat

Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan pada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah membiasakan

masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor soasial, struktur dan budaya setempat.

Menurut Wibowo dan Djajawinata (2004), ada tiga pendekatan yang harus dilakukan dalam pengelolaan sampah yakni pendekatan aspek teknis, pendekatan aspek kelembagaan dan pendekatan aspek keuangan dan manajemen.

Oleh karena itu sistem pengurangan sampah sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang no 18 tahun 2008 adalah salah satunya menggunakan metode 3R, dilaksanakan dalam wadah bangunan tempat pengelolaan sampah, dimana dalam wadah TPS 3R ini terdapat :

- Bangunan
- Pengkomposan dan pengkaryaan
- Peralatan dan mesin pencacah
- Pelatihan
- Sosialisasi
- Manajemen pelaksanaan dan pemasaran

B. Penelitian Terdahulu

Sehubungan topik penelitian ini, beberapa kajian dengan topik yang sama/atau yang berhubungan langsung dengan topik ini sebelumnya akan dibicarakan sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metodologi	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
	Nurul mukilda, 2013	Akuntabilitas pelayanan publik (studi kasus penyelenggaraan pelayanan izin mendirikan bangunan di kota makassar	Menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Makassar.	akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan IMB di kota Makassar yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Administrasi Perizinan dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan belum sepenuhnya akuntabel dalam memberikan pelayanan. Hal ini berdasarkan bahwa Acuan pelayanan belum berorientasi sepenuhnya kepada pengguna jasa. Hal ini, dilihat dari lamanya waktu pelayanan dan masih adanya biaya ekstra yang harus dikeluarkan pengguna jasa; Solusi pelayanan yang diberikan petugas belum sepenuhnya memberikan kemudahan kepada pengguna jasa karena masih ada sebagian petugas yang menerima imbalan atas bantuan yang diberikan dan kemudahan pelayanan masih bersifat diskriminasi; Prioritas kepentingan pengguna jasa belum sepenuhnya di prioritaskan, karena pengguna jasa terkadang menunggu dengan sebab petugas bersangkutan tak ada di tempat	Menggunakan teori elwood dengan dimensi serta indikatornya : 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran a. Kepatuhan terhadap hukum. b. Penghindaran korupsi dan kolusi. 2. Akuntabilitas Proses a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur. b. Adanya pelayanan publik yang responsif. c. Adanya pelayanan publik yang cermat. d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah. 3. Akuntabilitas program: a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal. b. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat. 4. Akuntabilitas Kebijakan a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.	bahwa untuk mengetahui akuntabilitas pelayanan publik yang terjadi di Kota Makassar khususnya pada pelayanan IMB, yang termasuk dalam kategori akuntabilitas proses (Sheila Elwood) yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas apakah sudah cukup baik. Hal ini, dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya. (fokus hanya pada akuntabilitas proses)
	Widi hartanto, 2006	Kinerja pengelolaan sampah di kota gombong Kabupaten kebumen	Pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan	bahwa rendahnya kinerja pengelolaan sampah di kota Gombong disebabkan oleh kurang optimalnya sistem pengelolaan sampah.	Membahas mengenai produksi timbulan sampah dan cara penanganannya, termasuk kaitan dengan aspek-aspek pengelolaan sampah	Fokus penelitiannya kepada kinerja, efektifitas sarana/prasarana dalam pengelolaan sampah,

			metode kualitatif digunakan untuk memberikan predikat kepada variabel-variabel persepsi yang dihasilkan dari data deskriptif guna menarik suatu kesimpulan. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan menganalisis pengukuran secara kuantitas terhadap variabel yang dikaji atau dianalisis.			berdasarkan analisis teori dan perhitungan matematis, antara lain lingkup kerja dengan jumlah sarananya
	Agus subroto (2009)	akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah kecamatan tlogomulyo kabupaten temanggung tahun 2008)	Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Angket (kuesioner) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Pao-pao	Sacara keseluruhan akuntabilitas pengelolaan dana alokasi desa di desa pao-pao kecamatan tanete rilau berjalan dengan baik dari keseluruhan dimensi yang dipaparkan, termasuk dalam dimensi transparansi yang menunjukkan pengelolaan dana alokasi desa berjalan transparan hal ini terjadi karena informasi yang mudah diakses dari desa dan komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengelolaan dana alokasi desa dianggap transparan hanya dari dimensi control yang perlu dioptimal sementara dari dimensi reabilitiy, responsibilitas dan responsivitas berjalan dengan baik.	Keberadaan akuntabilitas begitu vital terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah. Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanatkan kepada lembaga tersebut	Akuntabilitas dan transparansi diperlukan dan penting untuk dipahami. Mengingat dalam pengelolaan Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, efisien dan efektif. Semua kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD)

			Kabupaten Baru dan Dokumentasi adalah digunakan untuk memperoleh sejumlah data melalui bahan dokumen tertulis hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan.			
--	--	--	--	--	--	--

C. Kerangka Berpikir

Masalah sampah adalah masalah yang menjadi persoalan krusial saat ini, hal tersebut terjadi dikarenakan peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan produksi sampah yang dihasilkan, belum lagi dari aktivitas-aktivitas masyarakat (perkantoran, perdagangan dan bisnis lainnya) yang semakin berkembang pula. Jika tidak tertangani dengan baik maka akan menimbulkan dampak bagi kesehatan, lingkungan, sosial dan ekonomi.

Jika ditinjau dari perkembangan pengelolaan sampah beberapa tahun ini, pola penanganan sampah semakin tahun semakin baik, meskipun belum menunjukkan hasil dan memuaskan masyarakat secara keseluruhan. namun hal tersebut belum bersesuaian dengan ketentuan kebijakan, peraturan-peraturan penyelenggaraan pengelolaan sampah, misalnya pola penanganan sampah metode ambil, angkut dan buang di TPA yang dilakukan oleh DLHK, dengan keterbatasan jumlah karyawan dan cakupan layanan, sangat jelas akan menguras tenaga dan biaya operasional DLHK.

Padahal jika melibatkan masyarakat masing-masing lingkungan terutama yang telah memiliki TPS 3R maka produksi timbulan sampah akan tereduksi

cukup signifikan untuk diangkut ke TPA, dan akan mengurangi beban biaya operasional DLHK.

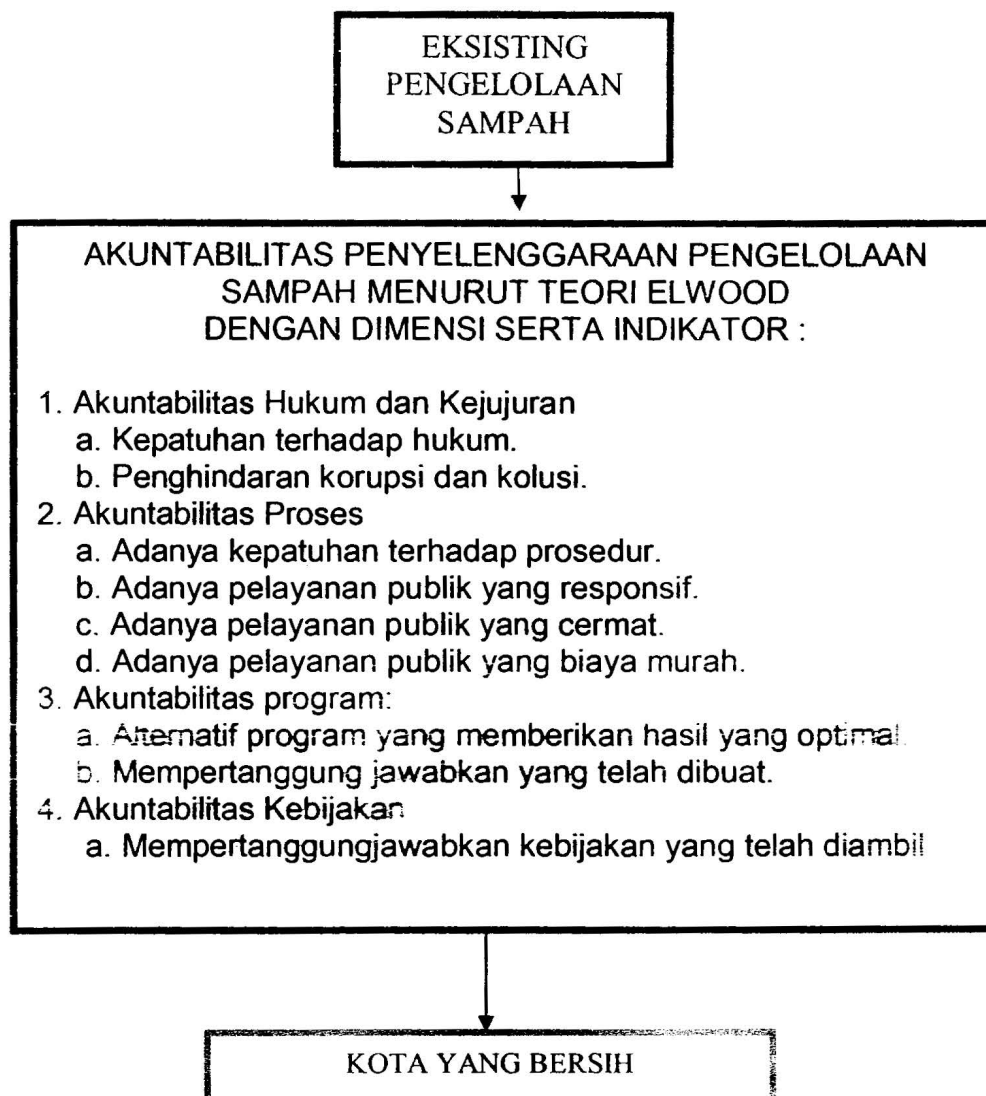
Berdasarkan temuan-temuan tersebut diatas meskipun berjalan dengan baik, tetapi jika ditinjau dari akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan sampah, masih dianggap belum optimal.

Oleh karena itu peneliti dalam menguraikan permasalahan tersebut akan meninjau akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan sampah menurut teori akuntabilitas Ellwood (1993) dalam Garini (2011:22) dengan dimensi akuntabilitas dan indikatornya sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran dengan indikator :**
 - a. Kepatuhan terhadap hukum
 - b. Penghindaran terhadap kolusi dan korupsi
- b. Akuntabilitas proses dengan indikator dengan indikator :**
 - a) Adanya kepatuhan terhadap prosedur
 - b) Adanya pelayanan publik yang responsif
 - c) Adanya pelayanan publik yang cermat
 - d) Adanya pelayanan publik yang biaya murah
- c. Akuntabilitas program dengan indikator :**
 - a) Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal
 - b) Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat
- d. Akuntabilitas kebijakan dengan indikator :**
 - a. Mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil

Kerangka pemikiran konseptual dari tesis ini digambarkan kedalam skema 2.1 kerangka pikir penelitian, dibawah ini

Skema 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



D. Operasionalisasi Konsep

Untuk memudahkan konsep permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa definisi operasional konsep teori Ellwood (1993) tentang dimensi beserta indikatornya, sebagai berikut :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

- a. Kepatuhan terhadap hukum diartikan sebagai kepatuhan terhadap undang-undang 18 tahun 2008, perda, pergub, perturan menteri, instruksi-instruksi, SOP kebersihan termasuk didalamnya PTMP yang telah dibuat oleh pemda
- b. Penghindaran korupsi dan kolusi diartikan sebagai upaya untuk menghindarkan diri dan orang lain (karyawan/staf) dari perilaku kolusi dan korupsi dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah

2. Akuntabilitas proses

- a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur diartikan sebagai kepatuhan terhadap prosedur penyelenggaraan pengelolaan sampah
- b. Adanya pelayanan publik yang responsif diartikan sebagai pelayanan persampahan yang cepat tanggap terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat
- c. Adanya pelayanan publik yang cermat diartikan sebagai pelayanan yang bersifat teliti, seksama, dan tidak sembrono dalam bekerja
- d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah diartikan sebagai pelayanan persampahan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan sebanding dengan kebutuhannya.

3. Akuntabilitas program

- a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal diartikan sebagai program yang bersesuaian antara keinginan dari atas (*top down*) dan keinginan masyarakat dari bawah (*bottom up*)

b. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat diartikan sebagai program-program kegiatan yang tertuang dalam DIPA DLHK akan dipertanggungjawabkan kepada bupati dan DPRD

4. Akuntabilitas kebijakan

a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil diartikan sebagai kebijakan yang bersifat taktis pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah lapangan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Sesuai dengan sifat permasalahan dan obyek kajian, maka penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah dengan mendeskripsikan hasil wawancara untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Pada teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara yang kemudian akan diperoleh data dari hasil wawancara tersebut. Dengan menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu teknik untuk memperoleh data maka hubungan peneliti dengan narasumber/ informan bersifat independen.

Tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis, dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yaitu tentang akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Untuk mendapatkan sumber informasi dalam penelitian ini diharapkan dari orang-orang yang berpotensi dan mempunyai pedoman sebagai informan mengenai akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Pemilihan informan dilakukan dengan memilih informan yang dianggap mengetahui persoalan yang ada atau dipandang mengetahui dan mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian ini. Secara umum informan dalam penelitian ini terdiri dari empat kategori, yaitu: informan dari pihak pemerintah setempat. Sasaran utama penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju yang berkaitan dengan faktor-faktor utama yang mendukung dan mendorong terciptanya pola akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam menjaga dan mengendalikan sampah secara berkelanjutan.

Adapun sumber yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 5 orang dari unsur pemerintah daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju, 1 orang dari dinas permukiman dan perumahan dan 4 orang dari masyarakat setempat khususnya yang memproduksi sampah setiap hari.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri dengan berbagai media yang dapat dipakai sebagai alat bantu dalam pengumpulan informasi dan segala data yang dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nasution (dalam Masdar, 2011:76) bahwa instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri sehingga peneliti secara langsung melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi dan mendengarkan dengan telinga sendiri sehingga tindakan awal yang dilakukan adalah validasi. Diperkuat oleh Yuwana (Bugin, 2001:101) bahwa kenapa peneliti sendiri dipandang sebagai instrument utama penelitian karena gejala empiris dilapangan terkadang sulit dan tidak dapat dibayangkan sesuatu muncul sebagai gejala empiris dalam masyarakat.

Ada beberapa langkah yang ditempuh oleh peneliti sebagai instrument utama dalam penelitian, yakni:

1. Peneliti sebagai instrumen utama, berusaha menjalankan fungsi peneliti secara efektif dalam mengamati berbagai aspek situasi dan kondisi di lapangan untuk tujuan pengumpulan data yang dibutuhkan.
2. Peneliti berusaha meningkatkan kepekaan dalam merespons setiap fenomena sosial yang terjadi, berkaitan dengan proses interaksi sosial yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat.
3. Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tetap melakukan penegasan, perubahan dan perbaikan bila di nilai perlu.

4. Pedoman observasi ini adalah catatan tertulis berisikan petunjuk-petunjuk dan pedoman bagi peneliti untuk melakukan observasi di lapangan, agar observasi lapangan tidak keluar dari konteks fokus penelitian.
5. Pedoman wawancara berisi petunjuk-petunjuk wawancara kepada subyek-subyek (informan) yang akan diwawancarai agar tidak keluar dari konteks fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam pada informan yang telah ditunjuk dan ditentukan.
6. Catatan lapangan yang digunakan pada situasi observasi yang bisa merupakan laporan langkah-langkah peristiwa dan gambaran umum yang singkat pada setiap lokasi.
7. Alat perekam suara, berupa tape recorder digunakan terutama untuk membantu pencatatan hasil wawancara dengan subyek (informan). Alat perekam ini tidak hanya digunakan pada saat wawancara dilakukan, tetapi juga pada saat pengamatan atau observasi lapangan di laksanakan, diskusi-diskusi dengan pembimbing, dan seminar hasil penelitian.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian ini, yaitu menggambarkan secara komprehensif tentang akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat , maka data yang diperlukan bersifat deskriptif kualitatif. Untuk maksud tersebut, ada 3 (tiga) prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan tersebut:

Observasi (*observer method*) yaitu, melalui metode ini peneliti dapat melihat langsung realitas sosial sehari-hari untuk memahami fenomena yang dihadapi oleh subyek. Pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, pengamatan yang dilakukan tentu berbeda dengan pengamatan kehidupan keseharian sebab pengamatan dalam penelitian ini memiliki syarat-syarat tertentu, seperti membatasi pengamatan dan dilakukan secara cermat, sehingga dapat menghasilkan pengamatan yang baik dan merupakan jaminan bahwa hasil pengamatan sesuai dengan realitas yang menjadi sasaran penelitian. Pengamatan yang dilakukan yakni dilakukan secara langsung, adapun data yang dihimpun dalam pengamatan ini adalah model akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

1. Dalam pengamatan ini peneliti menyediakan dan mempersiapkan (1) catatan-catatan (*check list*), (2) alat elektronik seperti tustel atau *handycam*, dan *tape recorder*, (3) memusatkan perhatian pada data-data yang relevan, (4) mengklarifikasi gejala dalam kelompok yang tepat, dan (5) menambah bahan persepsi tentang obyek yang diamati. Dimana instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri.
2. Wawancara mendalam (*in-depyh Interview*) yakni bertanya langsung kepada para informan tersebut diatas baik menggunakan daftar pertanyaan maupun tidak, secara mendasar dan mendalam yang signifikan dengan penelitian.

Wawancara merupakan metode yang banyak digunakan dalam mendapatkan informasi dari khalayak (Kerlinger, 1973:269) dalam

penelitian kualitatif, wawancara merupakan instrumen yang sangat dominan dalam mengumpulkan data. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian secara lisan dari seseorang secara langsung, dalam wawancara ini tidak ditentukan terlebih dahulu siapa dahulu yang akan diwawancarai, melainkan data atau informasi apa lagi yang diperlukan dalam penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa data dan informasi yang diperlukan dianggap sudah cukup. Data direkam dengan menggunakan instrumen wawancara tidak berstruktur, kamera dan *tape recorder*.

3. Teknik dokumentasi, terutama untuk mengumpulkan data, informasi atau suatu peristiwa termasuk bahan yang sudah tertulis yang mendukung hasil penelitian.

Ada beberapa langkah dapat ditempuh dalam menyeleksi dokumen yang dipandang sangat bernilai dan relevan dengan data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi situasi sosial dan makna suatu peristiwa atau suatu perilaku individu dan komunitas dengan mempertimbangkan waktu dan tempat dimana suatu peristiwa sosial terjadi.
- b. Dalam hubungan dengan identifikasi, perlu di kenali kesamaan dan perbedaannya, yaitu menfokuskan pada suatu obyek, suatu peristiwa, tindakan dan perilaku yang dilakukan secara sama dan tentu dalam batas- batas situasi sosialnya, pada waktu yang sama, situasi peristiwa yang sama akan ditanggapi secara berbeda, oleh individu yang berbeda, dari kalangan yang berbeda dan dalam waktu dan tempat yang berbeda.

- c. Selanjutnya mengenali relevansi teoritis atas data yang diperoleh dengan mengharapkan dapat dipahami hubungan antara makna praktis (situasi riil) dan representasi simboliknya (nilai ideal) Bugin (2001:143-144)

E. Metode Analisis Data

Berdasarkan tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini, yakni menggambarkan secara komprehensif kondisi sampah perkotaan dan berusaha mencari cara dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam mengendalikan pengelolaan sampah, maka metode analisis yang digunakan adalah bersifat deskriptif-analitik kualitatif yakni mendeskripsikan dengan memakai teori-teori sebagai landasan, mengklasifikasikan dalam bentuk narasi, diolah menjadi ringkas dan sistimatis dengan verifikatif menuju kesimpulan dan bila dibutuhkan akan digunakan analisis deskriptif sebagai penguat.

Disadari bahwa ciri penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses penelitian, maka penelitian ini data dianalisis sejak penelitian berlangsung hingga berakhirnya proses pengumpulan data. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Idham (2007:75) bahwa peneliti yang melakukan penelitian kualitatif sudah harus memulai penulisan laporan penelitian sejak berada dilapangan karena proses analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, maka kecil kemungkinan terjadinya kekurangan data kerena peneliti akan dengan mudah melihat unsur-unsur analisis yang hilang atau tidak dibicarakan dengan informan pada saat penggunaan metode wawancara dan pengamatan langsung.

Langkah awal yang penulis lakukan adalah membuat kategori-kategori dalam bentuk lembaran-lembaran. Data yang penulis dapatkan kemudian

dimasukkan ke dalam kategori yang sesuai, misalnya data tentang latar belakang informan, data tentang kondisi sosial budaya yang mendorong terciptanya pola interaksi sosial merupakan kategori data sehingga memudahkan penulis mengklasifikasinya.

Langkah selanjutnya direduksi dengan mencari intinya (abstraksi), hasil abstraksi tersebut disesuaikan dengan temuan-temuan lain yang berfungsi sebagai penguat atau pengaya data. Pada saat yang sama temuan data juga dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memperkuat data sehingga validitasnya nampak atau kelihatan (pengabsahan data). Langkah-langkah tersebut sejalan dengan pendapat Moleong (2002:103) bahwa analisa data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesa kerja yang didasarkan oleh data. Data berupa hasil transkripsi hasil wawancara, catatan observasi, dianalisis dengan: 1) menelaah seluruh data yang telah diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami secara mendalam data-data tersebut, 2) mereduksi data dengan cara abstraksi, abstraksi merupakan proses menganalisis dan merangkum intisari data, 3) memeriksa keabsahan data.

Pendapat Moleong tersebut di atas, bercirikan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, analitik dan interperetatif. Langkah tersebut, di perkuat oleh langkah-langkah pengolahan data yang dikemukakan oleh Creswell (1994:152) dimana data-data tersebut ditafsirkan oleh penulis secara terus-menerus data dan informasi yang diperoleh memelalui keterkaitan antara fenomena berdasarkan kerangka konseptual yang telah ditentukan.

Adapun analisis data selama pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data, yakni; pada saat wawancara peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, sampai pada tahap tertentu untuk memperoleh data yang valid dan kredibel. Analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai datanya dianggap cukup atau sudah jenuh.

Kemudian tahap akhir, melakukan reduksi data yakni merangkum, memilih, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang telah diperoleh dari hasil catatan lapangan untuk dicari tema dan polanya. Hal ini membantu peneliti untuk mempertajam fokus, membuat kategorisasi, dan menyusun klasifikasi guna pendalaman dan penyusunan rencana kerja lebih lanjut. Maka pada tahap ini tentunya data yang tidak relevan dengan pertanyaan dasar penelitian, dipisahkan.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data (*data display*) ke dalam pola hubungan yang bermakna, agar memudahkan untuk memahaminya. Akhirnya penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langkah ini merupakan tahap ketiga analisis data, yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi dari hasil reduksi dan penyajian data sebelumnya. Ketiga model atau langkah tersebut dilakukan atau dianalisis secara terus-menerus, interaktif, dan bersiklus selama pengumpulan data lapangan hingga seluruh proses penelitian berakhir.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun hal-hal yang akan dikemukakan dalam bab ini terdiri dari keadaan geografis, keadaan demografi, dan batas-batas wilayah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

1. Kondisi Geografi

1. Letak Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Mamuju terletak pada Bagian Barat Pulau Sulawesi dan berposisi pada bentangan Selat Makassar, yakni 1 38 ' 110 " – 2 54 ' 552 " Lintang Selatan, 11 54 ' 47 " – 13 5 ' 35 " Bujur Timur, Jakarta (0 0 ' 0 " , Jakarta = 160 48 ' 28 " Bujur Timur Green Witch). Dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Mamuju Tengah
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Majene, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Mamasa.
- d. Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

Kabupaten Mamuju dengan luas wilayah 524.131 Ha, secara administrasi Pemerintahan, terdiri atas 16 Kecamatan, 143 Desa, 10 Kelurahan, dan 4 (UPT) Unit Pemukiman Transmigrasi. Diantara 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju, 15 kecamatan berada di wilayah daratan dan 1 kecamatan di wilayah kepulauan.

Ibukota Kabupaten terletak di Kecamatan Mamuju. Berdasarkan orbitasi, Kecamatan yang letaknya terjauh dari ibukota kabupaten adalah Ibukota Kecamatan tommo yaitu sejauh 100 Km, dan ibukota kecamatan yang terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Simboro yang berjarak 1 Km dari kecamatan Mamuju.

Kabupaten Mamuju juga memiliki wilayah kepulauan yakni Kecamatan Kepulauan Bala-Balakang, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Simboro dan Kepulauan. Pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kepulauan Bala-Balakang adalah Pulau Salissingang, Samataha, Popoongang, Saboyang, Malamber, Sumanga, Sabakatang, Ambo, Seloang, Lamudaan, Tapilagan dan Pulau Lumu, yang letaknya di Selat Makassar dan berbatasan dengan Pulau Kalimantan.

2. Luas Wilayah

Mengenai luas wilayah perkecamatan, jumlah Desa dan Kelurahan serta UPT pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4. 1. Luas Wilayah, Jumlah Desa, Kelurahan dan UPT pada Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Mamuju

No.	Kecamatan	Luas(Ha)	Prosentase	Desa/UPT	Kelurahan
1.	Tapalang	50.411	6,29	7	2
2.	Tapalang Barat	12.714	1,59	7	-
3.	Mamuju	16.024	2,00	4	4
4.	Simboro	9.169	1,14	6/1	2
5.	Kalukku	46.199	5,76	11/1	2
6.	Kalumpang	177.821	22,19	13	-
7.	Bonehau	95.076	11,86	9	-
8.	Papalang	16.043	2,00	9	-
9.	Sampaga	9.594	1,20	7	-
10.	Pangale	23.252	2,90	9	-
11.	Tommo	58.828	7,34	14	-
12.	Kep. Bala-balakang	9.000	0,11	2	-

	Jumlah	524.131	100,00	98/2	10
--	---------------	----------------	---------------	-------------	-----------

Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa luas wilayah Kabupaten Mamuju seluas 524.131 Ha, kecamatan Mamuju memiliki luas 16.024 Ha dan Kecamatan Simboro memiliki luas 9.169 Ha, kedua wilayah kecamatan tersebut adalah kecamatan yang menjadi fokus DLHK

3. Keadaan Alam dan Iklim

a) Jenis Tanah

Berdasar data geologi Kabupaten Mamuju, jenis tanah di daerah ini dapat digolongkan 5 (lima) jenis, yakni tanah Alluvial, Regosol, Andosol dan tanah Mediteran. Sedang untuk kandungan geologi di Kabupaten Mamuju secara garis besarnya dibagi menjadi 2 (dua), yakni kelompok bahan galian konstruksi dan kelompok galian industri.

b) Iklim

Secara klimatologis Kabupaten Mamuju tidak memiliki perbedaan dengan daerah lain di Indonesia yaitu hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin yang banyak mengandung uap air berhembus dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan.

c) Keadaan Demografi

Adapun Keadaan Demografi Kabupaten Mamuju Akan diuraikan Sebagai berikut :

1) Kependudukan

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik, penduduk Kabupaten Mamuju pada tahun 2013 berjumlah 284.026 jiwa yang tersebar di 15 Kecamatan.

Tabel 4.2.
Data Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Mamuju 2016

No	Kecamatan	Jumlah Jiwa		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	Tappalang	10.244	10.128	20.372
2	Tappalang Barat	5.101	5.088	10.189
3	Mamuju	34.388	33.633	68.021
4	Simboro	14.314	13.927	28.241
5	Balak-balakang	1.415	1.239	2.654
6	Kalukku	29.741	28.836	58.577
7	Papalang	12.155	11.784	23.939
8	Sampaga	7.898	7.721	15.619
9	Tommo	12.238	10.959	23.197
10	Kalumpang	6.154	5.706	11.860
11	Bonehau	5.050	4.539	9.589
	Jumlah	138.698	133.560	272.258

B. Hasil

Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan sampah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Mardiasmo (2006 : 5) bahwa akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal (pertanggung jawaban ke atasan) dan akuntabilitas horisontal (pertanggung jawaban ke masyarakat), dengan dimensi dan indikatornya (Ellwood, 1993) sebagai berikut :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran dengan indikator :

a) Kepatuhan terhadap hukum

- b) Penghindaran terhadap kolusi dan korupsi
- 2. Akuntabilitas proses dengan indikator dengan indikator :
 - a) Adanya kepatuhan terhadap prosedur
 - b) Adanya pelayanan publik yang responsif
 - c) Adanya pelayanan publik yang cermat
 - d) Adanya pelayanan publik yang biaya murah
- 3. Akuntabilitas program dengan indikator :
 - a) Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal
 - b) Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat
- 4. Akuntabilitas kebijakan dengan indikator :
 - a) Mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil

Berikut petikan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Mamuju, masyarakat dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
 - a. Kepatuhan terhadap hukum

Menurut kepala dinas DLHK kabupaten Mamuju yang berinisial HM, menyatakan bahwa :

“... meskipun saat ini PERDA persampahan masih dalam masa penggodokan di DPRD tetapi dalam pelaksanaanya DLHK kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi DLHK yang terbaru, sesuai dengan aturan kelembagaan yang baru dan Standar Operasional Pelaksanaan persampahan yang disesuaikan dengan perencanaan teknis manajemen persampahan (PTMP) yang pada tahun 2015 disusun oleh konsultan dari Satker PLP Kementerian PU . (wawancara, Mei 2017)..”

Lebih lanjut Salah seorang staf berinisial A dari satuan kerja PLP bidang persampahan meluruskan bahwa :

“.....kepatuhan dalam hukum adalah kepatuhan dalam menjalankan undang-undang (UU) pengelolaan sampah No 18 tahun 2008.

b. Penghindaran terhadap korupsi dan kolusi

Menurut kepala seksi kebersihan yang berinisial AM :

“... kami berusaha melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tupoksi organisasi saat ini, otorisasi dalam menjalankan penyelenggaraan pengelolaan sampah harus dijawab dengan kerja yang maksimal, jujur dan ikhlas. Intinya kami bekerja dari pagi sampai sore, kadang lembur sampai jam 24 malam tanpa ada tambahan uang lembur (wawancara, Mei 2017)..”

Ditambahkan oleh kasie perlengkapan dan peralatan berinisial HS

“... untuk menghindari adanya praktek pemungutan sampah yang pilih kasih, karena keluarga atau teman, maka kebijakan kami pemungutan retribusi sampah tidak dilakukan oleh petugas kebersihan itu sendiri tetapi oleh kolektor yang telah ditunjuk (wawancara, Juni 2017)..”

2. Akuntabilitas proses

a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur

Wawancara dengan AM kasie kebersihan :

“.....prosedur pengambilan sampah dari rumah tangga/kontainer sampah menggunakan motor sampah atau truk sampah yang kemudian diangkut langsung ke TPA adi-adi (wawancara, juni 2017).”

“..... metode pemungutan sampah secara umum adalah ambil, angkut dan buang ke TPA (wawancara, juni 2017).”

b. Adanya pelayanan publik yang responsif

Wawancara dengan staf DLHK sekaligus koordinator/pengawas wilayah berinisial AW, bahwa :

“..... setiap saat sampah selalu timbul atau terkadang kami mendapatkan telpon adanya sampah yang tidak terangkut oleh petugas kebersihan oleh karenanya motor patroli sampah akan bergerak kewilayah-wilayah tersebut pada saat itu juga(wawancara, juni 2017).”

c. Adanya pelayanan publik yang cermat

Wawancara dengan staf DLHK sekaligus korditor/pengawas wilayah

berinisial AW, bahwa :

“.....dalam melaksanakan tugasnya, misalnya untuk yang menggunakan truk sampah, maka personil terdiri dari 2 orang diatas truk dan 2 orng yang mengangkat sampah ke truk, sedangkan yang menggunakan motor sampah terdiri dari 2 orang yaitu 1 orang driver dan 1 atau 2 orang yang mengangkat sampah ke bak motor (wawancara, juni 2017).”

Sebagai pembanding atas kinerja DLHK Kabupatn Mamuju, kami melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat, antara lain :

Warga kelurahan rimuku yang berinisial BA

“... saya ini warga yang bertempat tinggal dipinggir jalan, pengangkutan sampah dilakukan setiap harinya menggunakan truk sampah untuk mengambil sampah langsung dari bak sampah yang terdapat di masing-masing rumah, namun terkadang pada wilayah tertentu masih terdapat sampah yang bertumpuk, contohnya di sekitar jembatan perumahan PEMDA, pinggir kanal dan lain-lain . (wawancara, Mei 2017)..”

Warga kelurahan karema yang beinisial AS

“...petugas kebersihan biasanya mengambil sampah masih menggunakan motor sampah, terkadang dua hari sekali ... (wawancara, Mei 2017)..”

Namun pada kelurahan yang sama disekitar BTN AMPI, petugas kebersihan jarang sekali datang,

“... sudah hampir 1 bulan ini petugas kebersihan tidak datang mengambil sampah, padahal kami sudah membeli bak-bak sampah dari DLHK, kami juga membayar retribusi Rp 5000 tiap bulannya, daripada bau terpaksa kami membuang sampah dibelakang rumah

saja, ujar salah seorang warga yang berinisial MG dan MD (wawancara, Mei 2017)

d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah

Wawancara dengan HS kasie perasarana dan sarana :

“... biaya retribusi persampahan untuk skala perumahan/permukiman memang sangat murah dan tidak mencukupi, berkisar Rp.5000 per rumah tangga . (wawancara, Mei 2017)..”

3. Akuntabilitas program

1. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal

Menurut kepala dinas DLHK kabupaten Mamuju yang berinisial HM, menyatakann bahwa :

“... program kegiatan DLHK khususnya dalam bidang kebersihan, tentu akan merujuk kepada visi misi kepala daerah yaitu Mamuju Mapaccing (kabupaten mamuju yang bersih dan indah), oleh karena itu program kerja tahunan kami (renja) akan disesuaikan dengan visi misi yang ada. Program kerja SKPD juga diambil dari beberapa masukan masyarakat pada saat MUSREMBANG kabupaten . (wawancara, Mei 2017)..”

“... dalam menjalankan visi misi tersebut kami bekerja sama atau berbagi tugas dengan dinas perumahan dan permukiman kabupaten mamuju untuk tupoksi pemeliharaan taman kota, anjungan dan pedestrian. (wawancara, Mei 2017)..”

Sementara itu salah seorang eselon IV yang berinisial HS, menyampaikan :

“... fokus pelaksanaan kegiatan yang kami laksanakan ini adalah bagaimana mengangkut sampah ke TPA, sehingga sampah-sampah ini tidak menimbulkan gangguan kesehatan dan estetika kota, adapun aleternatif program penanganan sampah sesuai dengan yang disarankan dalam PTMP belum dapat dilaksanakan secara penuh selain karena belum ada landasan peraturan bupati khusus penanganan persampahan, juga karena keterbatasan pembiayaan. Memang TPS 3R di mamuju sudah banyak dibangun oleh Satker PLP, namun tidak berjalan dan berfungsi pungkasnya . (wawancara, Mei 2017)..”

2. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat

Wawancara dengan HM kepala DLHK :

“... kesemua program yang menjadi otaoritas kami (terdapat dalam DIPA DLHK), dipertanggung jawabkan secara vertikal (bupati dan DPRD), indikator penilaiannya dilihat dari penyerapan anggaran dengan hasil lapangan, pada setiap tahunnya, dan akan diaudit oleh inspektorat kabupaten (bawasda) . (wawancara, Mei 2017)..”

4. Akuntabilitas kebijakan

a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil

Wawancara dengan AM, kasie kebersihan, bahwa :

“... terkadang dalam proses pelaksanaan kegiatan terdapat hal-hal yang sifatnya diluar mekanisme misalnya dana operasional belum dapat dicairkan, atau terdapat kejadian kerusakan diluar perencanaan anggaran sebelumnya, sedangkan sampah jika tidak diangkut akan menimbulkan masalah bagi kami, maka pimpinan (eselon) akan mengambil kebijakan mengambil dana talangan dari porsi lainnya yang terdapat di DIPA DLHK atau tindakan lainnya yang tidak dapat di sebutkan kepada saudara. (wawancara, Mei 2017)..”

C. Pembahasan

Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan sampah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dimanahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kabupaten Mamuju, yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2016 pada pasal 12, bidang kebersihan DLHK Kabupaten Mamuju, mempuyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis, pembinaan kegiatan pengelolaan sampah

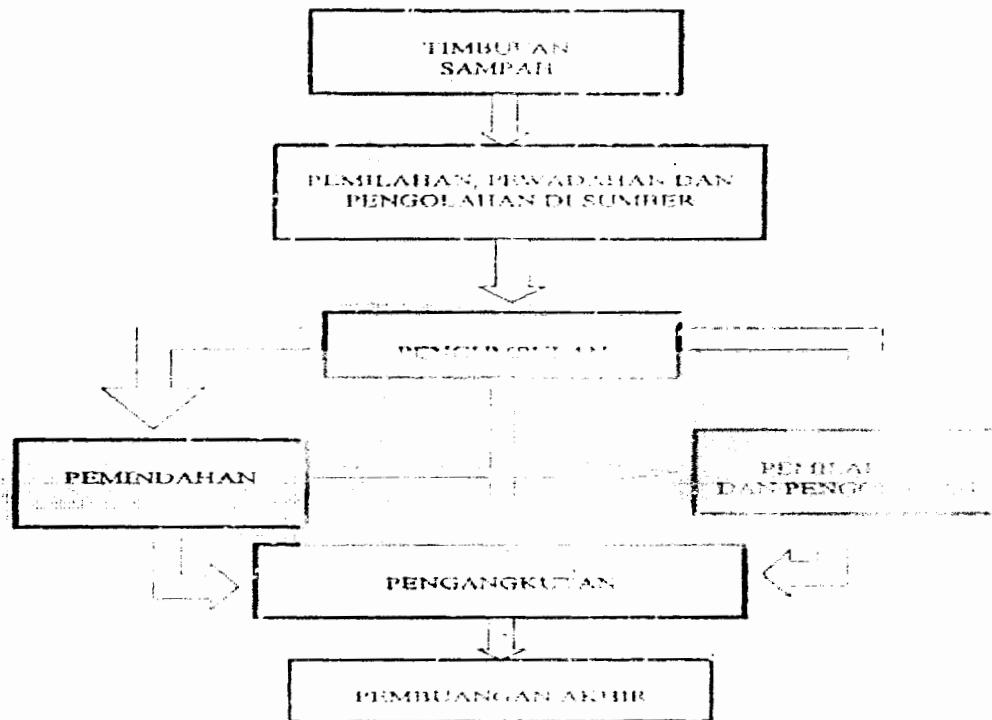
- b. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan kebersihan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- c. Menginventaris permasalahan – permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya.

Melaksanakan pengelolaan persampahan, sarana dan prasarana kebersihan.
- d. Melakukan koordinasi dengan semua stakeholder untuk melaksanakan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan kualitas lingkungan khususnya dalam hal pengelolaan sampah;
- e. Melakukan kerja sama dan pembinaan terhadap pemerhati lingkungan yang bergerak dalam bidang kebersihan kota;
- f. Pelaksanaan tugas lain untuk diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam diagram berikut ini, SOP DLHK terdiri dari dua bagian yang tidak sama persis, pada skema 1.1 skema tersebut melibatkan masyarakat (pengolahan dan pemilahan) sebagai berikut :

Skema 4.1.

Skema Standar Penyelenggaraan dan Pengelola Sampah



Sedang dalam pelaksanaan kegiatannya DLHK membuat SOP dengan menyesuaikan dengan kemampuan daerah dalam hal tenaga, armada, dan keuangan

Skema 4.2

BAGAN ALIR PROSES
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN
PENGELOLAAN TEHNIK DAN PERSAMPAHAN KABUPATEN MAMUJU

No	Proses/ Kegiatan	P e m r o s e s			Dokumen
		Pemohon c	DLHK D	TPA E	
1.	Pengajuan Masyarakat Sampah pelanggan Kebersihan		★		Pengisian biodata pelanggan
2.	a. Pelanggan menyiapkan wadah tempat sampah b. Pelanggan memilah jenis sampah. yang dihasilkan dimasukkan ketempat sampah yang telah disediakan				Wadah tempat sampah di tempatkan berada di depan rumah yang mudah terjangkau dengan tidak mengganggu fasilitas umum
3.	a. Pengangkutan Sampah dengan menggunakan mobil sampah b. Pengangkutan Sampah secara langsung (door to door) atau sampah Luar biasa / Hasil Kerja Bakti		★		Sampah yang diangkut langsung di bawah ke tempat pembuangan akhir (TPA)
4.	a. Pengangkutan Sampah dengan menggunakan Motor Fukuda Sampah b. Pengangkutan Sampah secara langsung (door to door) atau sampah Luar biasa / Hasil Kerja Bakti		★		Sampah yang diangkut langsung di bawah ke tempat pembuangan (Container) yang telah di tempatkan di beberapa titik
5.	Pengangkutan mobil sampah dengan melakukan pembongkaran di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah			■	Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Adi - Adi Desa Botteng Kec. Simboro
6.	Melakukan pembersihan atas Armada Mobil / Motor Fukuda pengangkut sampah dan melaporkan aktifitas rutin kepada pengawas		★		Armada di istirahakan khusus mobil di parkir di halaman Kantor dan Motor Fukuda di masing - masing driver

Kedua skema tersebut memiliki perbedaan yaitu tidak adanya alur pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber ataupun komposting (skema 4.2) fokus

pelaksanaannya hanya terhadap pola pelayanan, ambil angkut dan buang ke TPA. Pola pada skema tersebut (skema 4.2) sudah berjalan dengan baik, seluruh jajaran DLHK bekerja dengan maksimal sesuai dengan pola skema 4.2, meskipun di beberapa tempat terdapat wilayah yang tidak terlayani ataupun sudah dilayani namun sampah masih berserakan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan dan kondisi tenaga dan prasarana persampahan serta alokasi anggaran yang belum mencukupi, meski dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

Ketidakefektifan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh DLHK terletak pada ketidakmampuan melibatkan seluruh stakeholder, utamanya dalam pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya, dengan adanya pemilahan dan pengolahan di lingkungan (RT, dan TPS 3R) maka beban kinerja DLHK akan berkurang, berkisar 50% -70 % reduksi sampah organik (wawancara dengan TFL pemberdayaan TPS 3R Kabupaten Majene/Mamasa)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju dalam pemberian pelayanan persampahan pada saat ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Persampahan

Akuntabilitas yang terkait dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan DLHK Kabupaten Mamuju sebagai pemegang otorisasi tersebut, tidak hanya menunjukkan etos kerja semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dan hasil akhirnya apakah akan menciptakan kota yang bersih dan rapih

Untuk memperoleh hasil tersebut maka pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah, akan ditinjau dari teori akuntabilitas menurut Ellwood (1993) dalam Garini (2011:22) dimensi akuntabilitas dengan indikatornya sebagai berikut :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran dengan indikator

- a. Kepatuhan terhadap hukum

Indikator ini berkaitan dengan *probility and lagality accountability* atau *compliance* atau kepatuhan terhadap hukum/peraturan. Sebagai sebuah institusi pemerintahan, DLHK Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugasnya berpedoman regulasi persampahan, namun regulasi berupa perda persampahan dan peraturan bupati sebagai juknisnya sampai saat ini belum mendapatkan pengesahan dari legislatif, hal tersebut disampaikan oleh kepala dinas DLHK dan kepala seksi bidang kebersihan, bahwa saat ini pelaksanaan kerja dinas DLHK sementara ini berdasarkan pada tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kelembagaan yang baru yang termuat dalam PP 18 tahun 2016 tentang pedoman penataan perangkat daerah, SOP/Tupoksi dan PTMP, tapi dalam pelaksanaannya pelayanan persampahan kepada masyarakat masih bersifat pada umumnya yakni ambil, angkut dan buang di TPA.

Lebih lanjut Salah seorang staf berinisial A dari satuan kerja PLP bidang persampahan meluruskan bahwa kepatuhan dalam hukum adalah kepatuhan dalam menjalankan undang-undang (UU), dan UU yang dimaksud adalah UU pengelolaan sampah No 18 tahun 2008 dimana disebutksn bahwa "...Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas

keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah/kabupaten harus menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang sesuai dengan hirarki kewenangan, dan untuk saat ini pemprov. sulbar dan pemda kabupaten mamuju belum mengeluarkan perda tentang pengelolaan persampahan.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah itu sendiri tidak dapat dibebankan kepada DLHK semata, tetapi aspek peran serta masyarakat (TPS 3R) sebagaimana yang diamanatkan dalam PTMP kabupaten mamuju harus dijalankan juga.

Jika melihat dari kenyataan dilapangan, TPS 3R-TPS 3R yang telah dibangun oleh kementerian PU dan PR di beberapa lokasi dikabupaten mamuju, tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terjadi karena tidak adanya pembinaan dan bantuan operasional dari DLHK kepada KSM TPS 3R, padahal program tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat pemda sudah menyepakati pemberian bantuan pembinaan dan dana operasional dan tertuang puladalam dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS)

b. Penghindaran terhadap kolusi dan korupsi.

Melaksanakan pekerjaan sebagai pelayan masyarakat tidak lepas dari tupoksi organisasi dan integritas yang dimiliki oleh para staf/petugas DLHK. Tanggung jawab tanpa mengenal waktu serta sesuai perintah pimpinan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Persoalan kemudian terjadi ketika sifat manusiawi muncul, yang menyebabkan seseorang menjadi melenceng dari norma-norma hukum dan etika, biasanya dikarenakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau ketidaksukaan seseorang kepada orang lain menyebabkannya berbuat tidak adil dan bertindak deskrimanatif.

Pencegahan perilaku kolusi dan nepotisme seperti tidak mengambil sampah, bagi rumah tangga yang tidak memberikan uang tambahan atau lebih memprioritaskan wilayah (*sekampungnya*) tertentu daripada wilayah lain adalah hal yang harus dipikirkan solusinya.

Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut, maka kebijakan pemisahan petugas yang memungut sampah dengan yang memungut retribusi sampah (kolektor) dilakukan, ujar salah seorang kepala seksi yang berinisial HS

2. Akuntabilitas proses

Process accountability dalam hal ini digunakan prosedur, proses, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan, seperti

a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.

Prosedur dapat diartikan sebagai serangkain tindakan yang dilakukan dengan cara yang sistematis dan baku untuk pencapaian tujuan yang diinginkan, cara yang sistematis dan baku dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang dimaksud, dengan mengaitkannya prosedur yang terdapat dalam SOP dan PTMP, sebagaimana yang disampaikan oleh kasie kebersihan berinisial AM , bahwa Prosedur yang saat ini dilaksanakan oleh DLHK kabupaten mamuju dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP yaitu ambil, angkut dan buang,

dimana sampah-sampah yang dari rumah tangga atau kontainer sampah yang terdapat dipermukiman dan pasar-pasar diangkut dan dibuang ke TPA adi-adi.

Kepatuhan terhadap prosedur pelaksanaan kerja ini merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar, karena merupakan salah satu standar penilaian kinerja petugas kebersihan DLHK.

b. Adanya pelayanan publik yang responsif,

Pemberian pelayanan yang responsif, cepat dan tidak menunggu lama, adalah salah satu cara DLHK kabupaten mamuju dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah yang baik, keberadaan motor-motor patroli sampah sebagaimana disampaikan oleh staf kebersihan berinisial AW adalah salah satunya, dikarenakan kemampuan motor tersebut bergerak cepat mengambil sampah pada wilayah yang sulit dijangkau oleh truk, ataupun wilayah-wilayah yang sampahnya luput terangkut oleh truk-truk pengangkut sampah, untuk selanjutnya di ambil dan dibawah ke kontainer pengumpul.

c. Adanya pelayanan publik yang cermat

Adanya pembagian tugas dalam satu tim kerja sebagaimana yang disampaikan oleh AW yaitu 1 truk terdiri dari 2 orang di atas truk sebagai penerima sampah dan 2 orang yang mengambil sampah dari bin kemudian mengangkat sampah ke truk, adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kerja yang cermat.

proses pembagian tugas dalam 1 tim ini akan mencegah sampah banyak berceceran di sekitar bin dan jalan yang dilalui, tetapi yang lebih penting lagi memudahkan dan mempercepat pengambilan sampah dipermukiman-permukiman.

Meskipun demikian, dilapangan kadang terdapat hal-hal yang tidak seperti direncanakan, terkadang di beberapa tempat sampah-sampah masih bertumpuk dan tidak diambil oleh petugas kebersihan, seperti yang disampaikan oleh MG dan MD, hal tersebut belum tentu menunjukkan bahwa kinerja DLHK buruk dan tidak cermat sesuai prosedur pengambilan sampah, namun lebih kepada persoalan waktu pelayanan, cakupan wilayah dan tanggung jawab bersama,

d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah.

Pelayanan publik yang murah bukan berarti biaya yang dikeluarkan masyarakat betul-betul murah tetapi memenuhi standar retribusi sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafaruddin dan Priyambada (2001), besaran retribusi sampah adalah 1 % dari penghasilan per rumah tangga, jika UMR saat ini sebesar Rp. 1.600.000 /perbulan, maka retribusi persampahan senilai Rp. 16.000. Saat ini jika disesuaikan dengan perda retribusi untuk rumah tangga hanya berkisar Rp.5000 perbulannya, jika dihitung secara ekonomis, biaya operasional tidak akan sebanding dengan pemasukannya. Oleh karena itu pembiayaan pengelolaan sampah agar tetap berjalan dan bertarif murah, harus dibebankan langsung ke APBD.

3. Akuntabilitas program

a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal

Visi misi kepala daerah yaitu mamuju mapaccing (kabupaten mamuju yang bersih dan indah) adalah program DLHK kabupaten mamuju pula, untuk itu upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai visi misi tersebut harus

mendapatkan dukungan, baik dari kebijakan program yang diusulkan ke DPRD maupun dari segi penganggaran yang dibutuhkan. Pemerintah saat ini dalam membuat program-program kegiatan didasarkan pada MUSREMBANG (Mampu memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan dan pembangunan (Herman Finner (1941) dalam joko widodo (2011 : 67)), RPJMD, Renstra, Renja dalam lingkup visi misi tersebut, sehingga program-program yang dibuat betul-betul akan bersesuaian antara program pemerintah dengan keinginan masyarakat.

Dalam mewujudkan visi misi tersebut ada beberapa alternatif program yang dapat dilakukan dan diterapkan agar penyelenggaraan program persampahan memberikan hasil yang optimal, yaitu :

- 1). Pembuatan regulasi daerah, regulasi adalah dasar dalam melaksanakan pekerjaan agar tidak terkena masalah hukum, sehingga semua tindakan dan kebijakan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan
- 2). Teknik operasional, pola penanganan sampah saat ini dengan metode ambil, angkut dan buang adalah metode yang tidak efektif dan efisien, terutama dalam hal beban tenaga, beban operasional dan pemeliharaan kendaraan yang cukup besar
- 3). Kelembagaan, sudah waktunya program penataan dan pembentukan kelembagaan ini dilaksanakan, adanya pemisahan antara regulator dan operator yang jelas akan mengefektifkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan persampahan dikabupaten mamuju, sehingga akan lebih fokus dan jelas tanggung jawabnya. Fungsi regulator sebaiknya di tupoksikan ke SKPD

sedangkan fungsi operator di tupoksikan ke UPT (unit pelaksana teknis), BLU (badan layanan umum), Perusda/BUMD atau diswastakan (pihak ketiga)

4) Peningkatan kerja sama antar instansi dan stakeholder, kerja sama yang dimaksudkan adalah kerja sama program dan pembiayaan, selain antara SKPD dilingkup kabupaten mamuju, juga melibatkan perusahaan swasta melalui dana CSR yang dimiliki.

5) Peran serta masyarakat, melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sangat besar manfaatnya, program seperti reuse, reduce dan recycle adalah cara yang sangat baik terutama dalam hal meminimalkan timbulan sampah dari sumber

6) PHBS (pola hidup bersih dan sehat) adalah program kampanye dan edukasi sanitasi yang harus digalakan, dengan perilaku PHBS ini masyarakat akan sadar dengan sendiri betapa pentingnya kebersihan lingkungan itu.

b. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat.

Program kegiatan SKPD DLHK dipertanggungjawabkan setiap tahunnya, sebagaimana yang disampaikan kadis DLHK yang berinisial HM, bahwa kesemua program yang terdapat dalam DIPA DLHK akan dipertanggung jawabkan secara vertikal (bupati dan DPRD), dan akan diaudit oleh inspektorat kabupaten (bawasda), dan DLKH harus mampu memberikan jawaban berupa pertanggung jawaban kerja (LPJ).

Hal tersebut juga sejalan dengan yang dikatakan oleh sahruddin rasul (2002 :8) bahwa akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi

4. Akuntabilitas kebijakan dengan indikator Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.

Dalam ciri pemerintahan yang *accountable* yaitu mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan secara proporsional, maksudnya adalah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan persampahan tidak keluar dari koridor peraturan dan rahasia jabatan, hal tersebut disampaikan oleh kbid kebersihan DLHK bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil tetap memperhatikan aturan dan rahasia jabatan, apalagi jika itu menyangkut anggaran, intern dinas dan antar eselon, termasuk juga jika terjadi kondisi diluar kendali perencanaan semula, maka kami akan mengambil tindakan-tindakan yang bersifat *darurat*, intinya bagaimana proses penyelenggaraan pengelolaan sampah ini dapat berjalan, bagaimanapun caranya, namun tetap dipertanggungjawabkan baik kepada pimpinan, masyarakat maupun ketika diaudit.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data-data penelitian guna mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian tentang Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan indikator/parameter, maka dapat disimpulkan bahwa, jika ditinjau dari dimensi akuntabilitas (Ellwood), Akuntabilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kota di Kabupaten Mamuju yang dilaksanakan oleh DLHK sudah berjalan dengan cukup baik (1.akuntabilitas hukum dan kejujuran indikatorpenghindaran korupsi dan kolusi, 2. Akuntabilitas proses dengan indikator adanya kepatuhan terhadap prosedur, adanya pelayanan publik yang responsif, adanya pelayanan publik yang cermat, adanya pelayanan publik yang berbiaya murah. 3. Akuntabilitas program dengan indikator mempertanggung jawabkan yang telah dibuat. 4. Akuntabilitas kebijakan dengan indikator mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil), namun hasilnya belum optimal (1. Akuntabilitas hukum dan kebijakan dengan indikator kepatuhan terhadap hukum. 2. Akuntabilitas proses dengan indikator pelayanan publik yang cermat. 3. Akuntabilitas program dengan indikator alternatif program yang memberikan hasil yang optimal).

B. SARAN

Berdasarkan hasil interpretasi data dan kesimpulan di atas, maka untuk bermanfaatnya penulisan ini, maka penulis merekomendasikan beberapa hal

dalam rangka menerapkan akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan sampah di kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya pengguna kendaraan roda empat agar menyediakan tempat sampah di kendaraan masing-masing, dan bekerja sama dengan kepolisian dalam penindakan pada saat sweeping kendaraan roda empat.
2. Menempatkan kontainer-kontainer sampah di tempat-tempat strategis yang dapat dijangkau oleh Rumah Tangga dan Mobil Truk Amrol DLHK (contoh penempatan terlampir)
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD terutama dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan di Kabupaten Mamuju.(contoh tupoksi dinas perumahan dan permukiman dalam pedestrian jalan dan taman kota, sedang DLHK penyapuan jalan dan pengangkutan sampah taman)
4. Membuat data base dan analisis kebutuhan biaya penyelenggaraan pengelolaan sampah, sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan, perencanaan kerja dan strategi penyelenggaran pengelolaan sampah dalam bingkai visi misi mamuju mapaccing.
5. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk berperan serta secara aktif menanggulangi pengelolaan sampah
6. Melakukan pembinaan dan menghidupkan kembali tempat pengelolaan sampah metode reuse,recycle dan reduce (TPS 3R) yang telah dibangun oleh pemerintah pusat serta memanfaatkannya sebagai pengurang sampah dari sumbernya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arismunandar, 2004. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Gramedia Pustaka Utama; Jakarta.
- Bugin, 2001. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ciptono, F. 1996. *Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi*. Jakarta. Batang Gadis.
- Chandler, R.C & J.C. Piano. 1987. *The Public Administration Dictionary. Second Edition*. Santana Barbara. CA; ABC-CLIO Inc.
- Dara Aisya, 2008. *Hubungan Birokrasi dengan Demokrasi*. Artikel Jurnal administrasi Publik. Diakses pada tanggal 2 Maret 2011.
- Denhardt, Janet Vand Robert B. Denhardt 2007. *New Public Service*. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
- Douglas P. C. Ronald A. Davidson dan B. N. Shawartz. 2001. *"The Effect of Organizational Culture and Ethnical Orientation on Accountants Etical Judgements"* Journal of Business Ethics 34.
- Dubnick, 2001. *Mewujudkan Good Governnace melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- 2006, *Taladan dana Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Pusat Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada.
- 2002, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- 2003. *Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang harus dilakukan*. Policy Brief. Yogyakarta. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- 2002, *Paternalisme dalam Birokrasi*. <http://www.cpps.or.id>.
- 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik; Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta. Gava Media.
- Dwight. Y. King. *Indonesia New Order as a Bureacratic Polity, a Neopatrimonial Regime or a Bureacratic-Authoritarian Regime: What Difference Does it Make ?* Interpreting Indonesian Politics ed. Anderson dan Kahin.

- Dwiyanto.2011. *Administrasi Publik*, Jakarta : Kanisius.
- Drovin, Eugene P, dan Simmon, Robert H. 2000. *Dan Amoral Sampai Birokrasi Humanisme*.Jakarta. Prestasi Pustaka Raya.
- Edward, de Bono, 1996. *Buku Tentang Kearifan* (Penerjemah Toni Rinaldo). Jakarta. PT. Delapratasa.
- Effendi, Sofian.1993. *Strategi Administrasi dan Pemerataan Akses Pada Pelayanan Publik Indonesia*.Laporan Hasil Penelitian. Jakarta. Fisipol UGM.
- Elliot. 2007. *Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan Menyongsong Era Pasar Bebas: dan Bossy Attitude ke Service Minded* (sebuah review) Yogyakarta. Jurrial Bestari, Januari-April.
- Etzioni-Halevy, Eva. 1983. *Bureacracy and Democracy: A Political Dilemma*. London, Boston, Melbourne and Henle, Routledge and Kegan Paul.
- Etzioni, Amitai. 1982. *Organisasi-Organisasi Modern*. Jakarta. LP3ES.
- Evers, Hans Dieter, 1987. *The Bureucratization of Southeast Asia dalam Comprative Studies in Societyand History*. Volume 29, Number 4.1997.
- Frederickson, H. George, 1997. *Toward a New Publik Administration, dalam Frank E. Marini, Toward a New Public Administration: The Minnowbrok Perspective*. Nevato Chandler Publishing Company.
- Flyn, N. 1990.*Public Sector Management*: London.Harvester Wheatsheal.
- Garini, Indira. 2011. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas di Kota Bandung*. Bandung. Tugas Akhir Universitas Komputer Indonesia Bandung.
- Gaster.L 1995.*Quality in Public Service.Managers Choices*.Open University Press: Buckingham-Philadelphia.
- Gibson, J. L. Ivancevich, J.M. Donnely, J.H. Jr. 2000.*Organization: Behavior, Structure, Presses*. Tenth Edition, Singapore. McGraw-Hilf.
- Hadiwijoto, S. 1983. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Penerbit Yayasan Idayu. Jakarta
- Hasan,H. 2008. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung : Rosdakarya.

- Hamid, Abidin, Pirac. *Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan*. Diskusi Publik, www.yahoo.com., Lampung, tertanggal 7 Januari 2003
- Heady, Ferrel. 1966. *Public Administration and Public Affairs*, New Jersey. Prentice Hall Inc.
- Heady, Ferrel and Sybil I, Stokes (ed) 1962. *Papers in Comperative Public Administration*, The University of Michigan, Intittuteof Public Administration, Ann Arbor,
- Idham, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi aksara
- Kartasasmita, Ginanjar, 1995. *Pembangunan Menuju Bangsa Yang Maju dan Mandiri*. Yogyakarta: Pidato Hmiah Penerimaan Gelar Dr. HC. Dalam Ilmu Administrasi Pembangunan dari Universitas Gajah Mada, 15 Apri 1995.
- Kotler, 2004. *Interaksi Birokrasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kurniawan, 2005. *Profesionalisme Birokrat*, Jakarta : Media Indonesia.
- Kristiadi. J. B. 1994. *Reformulasi Birokrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Prima: Bisnis dan Birokrasi*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Nomor 3 Volume 1 September 1994. Universitas Indonesia.
- Kwik Kian Gie. 2007. *Reformasi Birokrasi dalam Mengefektifkan Kinerja Pegawai Pemerintah (makalah disampaikan dalam Workshop Gerakan Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdatui Ulama di Jakarta, 5 Januari 2003)*.
- Lawton dan Rose. 2001. *Akuntabilitas Kinerja dan Good Governance*. Illionis London : A Division of Scott, Foresman and Company.
- Lembaga Admnistrasi Negara, 2003, *SANKRI Buku 1 Prinsip-Prinsip Penyelenggara Negara*. Jakarta. LAN. RI.
- 2003. *Penyusunan Standart Pelayanan Publik*. Jakarta. LAN RI.
- Lessinger, 2000. *Acuntability : Challenge, Choices, Consequences, Gienvew*; Illionis London : A Division of Scott, Foresman and Company.
- Madjid, 2003. *Kota dan Penataannya*. Rajawali Press. Jakarta.

- Minogue, Martin. 1999. *Transparancy Of Public Administration*. London. Print Inc.
- Moleang, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Mohammad Ismail. 2008. *Pelayanan Publik Dalam Era Desentralisasi*-Artikel Jurnal Ilmu administrasi Publik.
- Mustopadidjaja, AR. 2002. *Kompetensi Aparatur Dalam Memikul Tanggung Jawab Otonomi Daerah Dalam Sistem Administrasi Negara*.
- Nasution, 2011. *Model Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia.
- Nawawi, Juanda, 2007. *Birokrasi Dan Budaya Penyelenggaraan Pemehntahan di Indonesia*. Artikel Jurnal Administrasi Publik. Diakses pada tanggal 2 Maret 2011.
- Osborne, David dan Plastrik, Peter. 2002. *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahn Wirausaha*, Jakarta. PPM.
- Osborne, david Ted Gaebler, 2005, *Mewirausahakan Birokrasi, Reveinting Government* Jakarta. PPM.
- Pidarta, M. 2005. *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem*. Jakarta : Asri Mahasatya
- Putra. Fadilah dan Arief, Saiful. 2001 *Kapitalisme Birokrasi. Kritik Reinventing Government* Osborne Gaebler. Yogyakarta. LK1S.
- Rasul, Syahrudin, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI
- Rasyid, R. 2003. *Regional Authonomy and Local Politics In Indonesia*. In Edward Espinall And Greg Fealy (ed) (2003). *Local Power and Democartization* Sinagapore; Institute of Southeast Asian Syudies.
- 1988. *Regional Responses to Central Government Authority; A Compratif Study of South Sulawesi and Aceh* (Master's Thesis Northen in Illinois University).
- Rahmat. 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Pubfik*. Jakarta, Pustaka Arif.
- Reddy. P. S. 1999. *Regional Government Democratisation and Decentralisation; Theoritical Consideration and Regional Gevemment Democratisation and*

- Decentralization; A Review of the Southern Africa Region*. Kenwyn; Juta & Co. Ltd.
- Riggs, Fred. W. 1964. *Teori Organisasi; Struktur, Desain dan Aplikasi* (Alih Bahasa Jusuf Udaya). Jakarta. Arcan.
- 1996. *Organizational Behavioral*. Seventh Edition. Englewood Cliff. Prentice Hall. Inc.
- Rondinelli, Nellis, and Cheema. 1984. *Decentralization in Developing Countries*, Worl Bank.
- Rondinelli DA 1981. *Government Decentralization in Comprative Perspektive; Theory and Practice in Developing Countries, International Review Of Administration Science*, Volume XLVII Number 2.
- 2007. *Government Serving People; The Changing Role Of Public Administration In Democrattc Governance. Dalam Public Administration And Democratic Governance : Governments Serving Citizens*, New York : United nations : Economic And Social Affair.
- Salahuddin, 2005. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- SANKRI, 2004. *Landasan Dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan Dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara*, Cet. 3; Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Santoso. Budi Priyo, 1993. *Birokasi Pemeriniahn Orde Baru, Perspektif Kulturalin dan Struktural*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarundajang. H.S. 2000. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta. Sinar Harapan.
- Sedarmayanti. 2004. *Pemerintahan di Era Modern*. Bandung, PT. Rineka Cipta.
- Setiono, Budi. 2002. *Jaring Birokrasi; Tinjauan Dan Aspek Poltik dan Administrasi*, Cakung Pakayangan Bekasi. Gugus Press.
- 2004. *Birokrasi Perspektif Politik dan Adiministrasi Pusat Semarang. Kajian OTODAdan Kebijakan Publik FISIP*.
- Siagian, Sondang P. 1994. *Patalogi Birokrasi, Analisis, Identifiakasi dan Terapinya*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- 1995. *Teori Pengembangan Organisasi*, Jakarta. B, UmiAksara.

- Siffin, William, J. (ed) 1959. *Toward Comparative Study Of Public Administration*. Indiana University Press. Bloomington.
- Steinberg, Sheldon S, dan Austern, David "T. *Government Ethics And Managers; Penyelewengan Aparat PEmerintahn*. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Steer, Richard M. 1995. *Efektivitas Organisasi* Cetakan II. Jakarta. Erlangga.
- Sudrajat Agus. 2008. *Membangun Model Pelayanan Publik Yang Dapat Memenuhi Keinginan Masyarakat*. Artikel Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta.
- 2006. *Metode Penelitian Kuliitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1994. *Karakteristik dan Penampj/an Birokrasi Perkotaan. Surabaya*, Program Pascasarjana Ilmu-Ilmu Sosial. Univeritas Airlangga.
- Suwandi, Made. 2008. *Konsepsi Dasar Otonomi Daerah di Indonesia; Dalam Upaya Mewujudkan Pemeriniahn Daerah Yang Demokratis dan Efisien*. (Artikel Jurnal Administrasi Publik).
- 2008. *Grand Design Penataan Otonomi Daerah*. Artikel Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
- Thoha Mifta 2009 *Birokrasi Pemerintahan Di Era Reformasi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- 1998. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta .PT. Raja Grafindo Persada.
- 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontenporer* Jakarta. Kencana Perdana Media Group.
- 1991. *Birokrasi dan Politik Di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Press.
- Thompson, Herbert. A. Simon Victor and Smithburg Donal. *Public Administration*. Transaction. United State Of Amerika.
- Trevino, Linda Klebe. 1986. *Ethical Decision Making in Organization: A Person Situation Interactionist Model Academy Of Management. Revie, July*.
- Tjokroawinoto. Moeljarto, 2001. *Birokrasi Dalam Polemik*. Siful Arif (editor). Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Tjokroamijojo, Bintoro, 2002. *Akuntabilitas Publik Peiiunya Pengembangan Indikator Kinerja*. D/sajikan pada Seminar sehari Penguatan Administrasi

Negara Menuju Ke Pemerintahan yang baik. Diselenggarakan oleh LAN Makassar, 12 Juni.

Thoha, Miftah dan Dharma, Agus (editor) 1999. *Menyoal Birokrasi Publik*. Jakarta. Balai Pustaka.

Turner, Mark and Hulme, David, 1997. *Governance, Administrasi, and Development: Making The State Work*. London: MacMillan Press Ltd.

Widodo, Joko. 2011, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Malang. Bayu Media Publishing

Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), *Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance*, Yogyakarta : Penerbit YPAPI, Oktober 2004

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pememntah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. *Tentang Pengelolaan Sampah*

Pemerintah Republik Indonesia, 2007. *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*.

Perencanaan teknis dan manajemen persampahan kabupaten mamuju. 2015

**LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA
RISET TESIS**

**“AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
SAMPAH KOTA DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI
SULAWESI BARAT”**

**OLEH :
Anas
NIM : 500654765**

A	<p>Akuntabilitas hukum dan kejujuran dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan terhadap hukum Apakah dasar pelaksanaan kegiatan pada dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK) kabupaten Mamuju? 2. Penghindaran terhadap kolusi dan korupsi Bagaimana strategi pencegahan terhadap kolusi dan korupsi dalam pelaksanaan kegiatan kebersihan ?
B	<p>Akuntabilitas proses dengan indikator dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepatuhan terhadap prosedur Bagaimana prosedur pengambilan sampah yang selama ini dilaksanakan? 2. Adanya pelayanan publik yang responsif Bagaimana bentuk pelayanan persampahan yang rensponsif yang dilaksanakan oleh DLHK kabuapten mamuju? 3. Adanya pelayanan publik yang cermat Bagaiamana bentuk pelayanan persampahan yang cermat?

	<p>4. Adanya pelayanan publik yang biaya murah</p> <p>Apakah biaya atau tarif retribusi yang dipungut sudah memadai?</p>
C	<p>Akuntabilitas program dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal <p>Bagaimana strategi program dan alternatif program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung sektor persampahan di kabupaten mamuju?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat <p>Bagaimana bentuk pertanggung jawaban kebijakan program yang telah dibuat oleh DLHK ?</p>
D	<p>Akuntabilitas kebijakan dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil <p>Terhadap pelaksanaan kegiatan di DLHK, terutama penanganan masalah persampahan (teknik operasionalnya) bagaimana tindakan taktis para pelaksana kebijakan?</p>



KEGIATAN :

LOKASI :

MENGETAHUI/MENYETUJUI :

DIPERIKSA/DISETUJUI :

DIBUAT OLEH :

MAHASISWA

ANAS
NIM : 500765654

JUDUL GAMBAR :

SKALA	NO. LEMBAR	JUMLAH LEMBAR
-------	------------	---------------

KETERANGAN :

KONTAINEV BALDAN

pelajaran IPS tentang jual beli dengan menanyakan siswa ketika siswa ke sebuah warung untuk membeli telur $\frac{1}{2}$ Kg, gula $\frac{1}{4}$ Kg dll.

Berbagai cara yang dilakukan oleh guru dalam mengolah pelajaran secara kreatif dan integratif sesuai dengan kemampuan peserta didik misalnya melalui metode pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan membuat pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Sehingga siswa mudah dalam memahami materi yang disampaikan guru.

4. Indikator Profesional Guru dalam mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan secara reflektif.

Guru kelas V SDN Kaligandu melakukan refleksi terhadap proses belajar mengajar yang tujuannya untuk mengetahui kinerja yang telah dilakukan. Dari tindakan refleksi guru akan mengetahui kelebihan dan kekurangannya dalam proses belajar mengajar sehingga akan tahu hal-hal yang akan dilakukan berikutnya atau sebagai evaluasi dalam meningkatkan keprofesionalannya.

Dalam meningkatkan keprofesionalan sebaiknya guru kelas V membuat makalah sebagai hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) namun karena kesibukannya pada tahun ajaran 2016-2017 belum sempat membuat PTK.

Untuk meningkatkan keprofesionalan guru diharapkan mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber agar tidak tertinggal dengan berbagai informasi serta untuk menambah pengetahuannya. Terlihat dari hasil penelitian bahwa guru kelas V dalam pembelajaran matematika juga telah menggunakan berbagai alat informasi untuk mendapatkan materi yang akan disampaikan. Materi-